

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN HIBAH SEBAGAI CARA MENSIASATI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA KUALA KERITANG KEC. KERITANG KAB. INDRAGIRI HILIR RIAU

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**NURKAMALIA
11521201170**

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANSYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/ 2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN
HIBAH SEBAGAI CARA MENSIASATI PEMBAGIAN
HARTA WARISAN DI DESA KUALA KERITANG
KEC. KERITANG KAB. INDRAGIRI HILIR RIAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**NURKAMALIA
11521201170**

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANSYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/ 2019 M



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Hibah Sebagai Cara Mensiasati Pembagian Harta Warisan Di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau*, yang ditulis oleh

Nama : **Nurkamalia**

NIM : **11521201170**

Program Studi : **Hukum Keluarga**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 Ramadhan 1440 H
21 Mei 2019 M

Pembimbing Skripsi

H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.
NIP : 197110062002121002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN HIBAH SEBAGAI CARA MENSIASATI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA KUALA KERITANG KEC. KERITANG KAB. INDRAGIRI HILIR RIAU* yang ditulis oleh :

Nama : **NURKAMALIA**
NIM : 11521201170
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2019
Waktu : 13.30 Wib
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. Zainal Arifin, MA

.....

Sekretaris
Ilham Akbar, S.H.I, SH, MH

.....

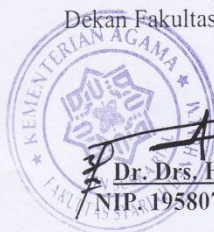
Penguji I
Yuni Harlina, M.Sy

.....

Penguji II
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

.....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN HIBAH SEBAGAI CARA MENSIASATI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA KUALA KERITANG KEC. KERITANG KAB. INDRAGIRI HILIR RIAU"**. Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang bahwa adanya pembagian harta yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut yang masih memegang teguh pembagian harta secara adat (kebiasaan) secara turun temurun. Salah satunya orang tua di desa tersebut telah memberikan harta kepada anak-anaknya sebelum mereka meninggal dunia. Meskipun di desa tersebut juga banyak tokoh agama yang memahami pembagian harta dengan cara waris (*faraidh*), akan tetapi pembagian harta kekayaan orang tua kepada anak-anaknya tetap dibagikan ketika orang tua masih hidup. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari konflik yang berupa pertikaian ataupun pertengkaran disuatu saat nanti setelah orang tua meninggal dunia. Adapun cara pembagiannya yaitu ada yang membagi sama rata, artinya bagian anak laki-laki mendapatkan bagian yang sama dengan anak perempuan, dan ada pembagiannya dilakukan sebagaimana dalam *faraidh*, akan tetapi pelaksanaan pembagiannya tetap semasa orang tua masih hidup.

Permasalahan pada penelitian ini adalah : Bagaimana Penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau.

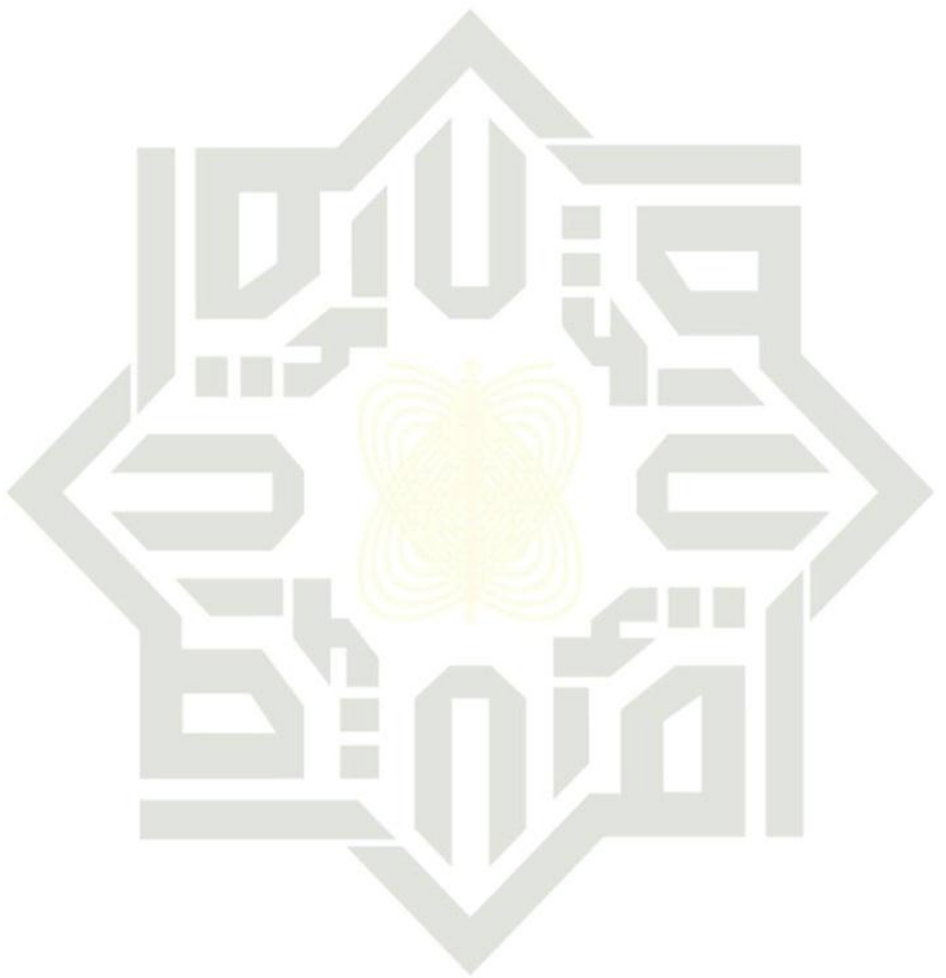
Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau, dalam penulisan skripsi ini analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif dan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah keluarga yang melaksanakan penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan dan tokoh masyarakat Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau. Populasi dalam penelitian ini yaitu, 1 orang tokoh agama, 1 orang tokoh masyarakat, 2 orang perangkat desa dan kepala keluarga yang melaksanakan pembagian harta di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau penulis mengambil 6 kepala keluarga untuk dijadikan sampel. Berdasarkan data tersebut penulis mengambil sampelnya dengan metode *purposive sampling*.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan yang dilaksanakan di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang disebut pembagian harta secara hibah, karena kasus dalam penelitian ini adalah orang tua memberikan harta kepada anaknya sebelum mereka meninggal dunia. Hal ini dilakukan untuk menghindari pertikaian dan pertengkaran antara ahli waris suatu saat nanti ketika orang tua telah meninggal dunia. Karena jika harta dibagikan secara waris maka akan menimbulkan konflik berupa pertengkaran ataupun perselisihan, hal tersebut terjadi karena adanya ketidakpuasan dari salah satu ahli waris dan juga kurang fahamnya dalam memahami pembagian harta secara *faraidh*, oleh karena itu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Mayoritas masyarakat di desa tersebut melaksanakan pembagian harta secara hibah. Penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau boleh dilakukan, dan keluarga yang melaksanakan pembagian harta sebagaimana dalam penelitian ini maka mereka dianggap melakukan *hibah* yang dibolehkan. Jika pembagian harta tersebut dibagikan untuk menghindari pembagian secara *faraidh* maka tidak boleh.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد.

Al-Hamdulillah penyusun panjatkan atas kehadiran Allah Subhaanahu Wataala. Yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh ummat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Aamiin.

Penulisan skripsi yang berjudul ” TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN HIBAH SEBAGAI CARA MENSIASATI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA KUALA KERITANG KEC. KERITANG KAB. INDRAGIRI HILIR RIAU” Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Nandu dan ibunda Nursiah yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu memberi kasih sayang sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- sampai pada perguruan tinggi saat ini, dan yang tersayang abang dan kakak penulis; M. Ansar, Suaidah Nour, Ratna Dewi, Amir Daus, Heriyanti S.Pd.I, dan Nurwilda, SE, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag., selaku ketua dan sekretaris jurusan Akhwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, selaku Pembimbing yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak Drs. Zainal Arifi, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan dukungan kepada penyusun selama kuliah, dari awal masuk hingga ananda meraih sarjana.
7. Kepala Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau Bapak M. Indris, SE., beserta jajarannya yang telah banyak membantu. Bapak Tamsir Sidiq, bapak Amiruddin, bapak Abd Razak, Ibu Martini, S.SI., dan seluruh pegawai Kantor Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau.
8. Teman-teman Angkatan 2015, khususnya teman-teman ahwal al-syakhsiyyah UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wata'ala. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekanbaru, 21 Mei 2019
Penulis

URKAMALIA
NIM. 11521201170



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Lokasi Penelitian	10
3. Subjek dan Objek Penelitian	10
4. Populasi dan Sampel	10
5. Data dan Sumber Data	11
6. Teknik Pengumpulan Data	11
7. Teknik Analisa Data	12
8. Teknik Penulisan	13
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN SECARA UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Kuala Keritang	15
B. Geografis	17
C. Demografis	18
D. Agama	19
E. Pendidikan	21
F. Kebudayaan	24
G. Struktur Pemerintahan	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG HIBAH DAN WARIS

A. Pengertian Hibah	29
B. Dasar Hukum Hibah	33
C. Rukun dan Syarat Hibah	36
D. Hikmah Hibah	46
E. Pengertian Waris	47
F. Rukun dan Syarat Waris	50
G. Asas Hukum Waris	51
H. Sebab-sebab Kewarisan	54
I. Ahli Waris	59
J. Hibah Hubungannya dengan Kewarisan	62

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN HIBAH SEBAGAI CARA MENSIASATI PEMBAGIAN HARTA WARISAN

A. Penggunaan Hibah Sebagai Cara Mensiasati Pembagian Harta Warisan di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau	66
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Hibah Sebagai Cara Mensiasati Pembagian Harta Warisan di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi Penduduk Desa Kuala Keritang Berdasarkan Jenis Kelamin	19
Tabel 2.2	Klasifikasi Penduduk Desa Kuala Keritang Berdasarkan Jenis Agama Dan Penganutnya	20
Tabel 2.3	Sarana Peribadatan Desa Kuala Keritang	20
Tabel 2.4	Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Kuala Keritang	21
Tabel 2.5	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kuala Keritang	23
Tabel 2.6	Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Kuala Keritang	24

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai agama universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam adalah untuk seluruh umat manusia, di manapun mereka berada.¹ Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah sehingga mereka tidak salah jalan.

Dalam Islam seseorang dapat memiliki harta agar dapat dikuasai secara penuh oleh karena itu, maka harus ada sebab yang menjadikan ia dapat memiliki harta tersebut dan dapat dikuasainya secara penuh. Adapun sebab-sebab kepemilikan atas harta itu yaitu, dengan cara hibah dan waris.

Adapun yang dimaksud dengan hibah, yakni pemberian sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.² Dalam rumusan kompilasi hukum Islam juga dijelaskan pada pasal 171 huruf g, "hibah adalah pemberian suatu

¹ Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru : Suska Press, 2014), cet. ke-1, h. 1.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1998), cet. ke-3, h. 466.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.³Hibah dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya akad, setelah itu tidak dilaksanakan tindakan penghibahan kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah.⁴

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemberian hibah tersebut dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada, agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Karena prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallahu ‘Alaihi Wasallam.,yaitu hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujui

Selain sebab kepemilikan harta secara hibah, harta juga dapat dimiliki dengan cara waris. Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada ahli warisnya. Pada umumnya pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, apakah matinya, mati *haqiqy*, *hukmy*, atau *taqdiry*. Kematian pewaris merupakan salah satu syarat pembagian harta warisan, baru dapat dilaksanakan pembagian harta warisan tersebut. Akan tetapi dalam kenyataan yang berkembang di masyarakat, pihak orang tua (pewaris) menginginkan agar sepeninggalannya, anak-anaknya dan ahli waris yang lain

³ Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama R.I, 2001), hlm.82.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (jilid 5)*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011). h. 435

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar tetap hidup dalam persaudaraan secara rukun. Untuk memenuhi keinginannya ini orang tua membagi harta kekayaannya ketika masih hidup.

Adapun ayat yang berhubungan dengan waris yakni Q.S. an-Nisa

(4);11-12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S. an-Nisa (4) : 11)⁵

Ayat ini berisi tentang pokok-pokok dalam ilmu *faraidh* (pembagian harta warisan), pada ayat ini Allah telah menggambarkan pembagian warisan untuk anak-anak, baik anak laki-laki, anak perempuan, maupun cucu, baik

⁵ Kementerian Agama, *mushaf Al-Qur'an dan Terjemah Hdits*, (Bandung : Cordoba, 2018), h. 78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

cucu laki-laki maupun cucu perempuan dan bagi orang tua, baik bapak/ibu maupun kakek/nenek.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ
لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”(Q.S. an-Nisa (4) : 12)⁶

Ayat di atas Allah menggambarkan pembagian warisan untuk suami maupun isteri, dan pada ayat 12 ini juga Allah menggambarkan pembagian

⁶ Kementerian Agama, *mushaf Al-Qur'an dan Terjemah Hdits*, (Bandung : Cordoba, 2018) h. 79.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan untuk saudara-saudara (kasus *kalalah*). Menurut mayoritas ahli sunnah maksud *kalalah* adalah seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan tanpa meninggalkan ayah.⁷

Pada masyarakat Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau, dalam pembagian harta warisan masih memegang teguh pembagian harta secara adat (kebiasaan) dalam masyarakat tersebut secara turun temurun. Salah satunya pembagian harta warisan orang tua sudah diberikan kepada anak-anaknya sebelum mereka meninggal dunia. Meskipun di desa tersebut juga banyak tokoh agama yang memahami pembagian harta dengan cara waris (*faraidh*), akan tetapi pembagian harta kekayaan orang tua tetap dibagikan ketika orang tua masih hidup, yaitu, orang tua membagikan harta kekayaan mereka sebelum meninggal dunia.

Adapun cara pembagian harta warisan yang sering terjadi pada masyarakat Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau adalah membagikan atau memberikan harta kepada anak-anaknya ketika masih hidup, sebagaimana kasus-kasus dibawah ini :

Bpk Siding anak pertama dari 5 bersaudra, yaitu Siding, Musdalifah, Saniah, Ismail, dan Nurhayati. Orang tua bpk Siding memiliki harta yaitu berupa kebun kelapa 2 ½ (dua setengah) ha. Dimana pembagian harta kepada anak-anaknya dilakukan dengan membagikan secara merata artinya tidak membedakan antara anak laki-laki dengan anak

⁷ Hajar M, *Op. Cit*, h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuannya. Saiding dan Ismail sebagai anak laki-laki mendapatkan masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) ha kebun kelapa, demikian juga Musdalifah, Saniah, dan Nurhayati mereka juga mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ ha kebun kelapa. Pembagian harta tersebut merupakan keinginan orang tua sendiri semasa masih hidup dan dengan atas kesepakatan anak-anaknya bersama. Sehingga semua anak-anaknya menerima atas kehendak orang tuanya tersebut.⁸

Bpk M. Syakur anak ke tiga dari 8 (delapan) bersaudara yakni, Siti Aminah, Nursidah, Fatimang, Ahmad, M. Syakur, Dahlan, Akbar dan Megawati. Harta orang tua bpk Syakursebanyak $6 \frac{1}{2}$ hektar kebun kelapa. Pembagian harta dilakukan dengan ketika orang tua masih hidup, dimana bagian anak laki-lakinya mendapatkan kebun kelapa lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuannya. Pembagian harta tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama.⁹

Pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau dilakukan atas kesepakatan keluarga mereka masing-masing dimana ada yang melakukan pembagian tersebut dengan memanggil tokoh agama untuk menjadi saksi dalam pembagian harta warisan di keluarga mereka, dan ada juga yang melakukan pencatatan pembagian harta pada kantor desa setempat yang sebelumnya harta tersebut

⁸ Bpk Siding, ahli waris, *Wawancara*, Jum'at, Tanggal 07 Desember 2018.

⁹ Bpk M. syakur, ahli waris, *Wawancara*, Sabtu, Tanggal 08 Desember 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lah dibagikan dirumah secara musyawarah dengan keluarga di rumah mereka sebagai data penguat atas kepemilikan harta tersebut.¹⁰

Dalam kasus yang penulis sebutkan di atas keluarga yang membagikan hartanya sebelum orang tua tersebut meninggal dunia, mereka menganggap pembagian tersebut sebagai pembagian harta warisan, sedangkan harta warisan baru ada ketika pewaris telah meninggal dunia. Jadi, dalam kasus tersebut bukan pembagian harta warisan, akan tetapi pembagian harta secara hibah. Karena pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan ketika ada yang meninggal dunia.

Penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan dilakukan dengan alasan agar setelah pewaris meninggal dunia tidak terjadi konflik berupa perselisihan ataupun pertengkaran antara ahli waris ketika orang tua meninggal dunia nanti.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut masalah ini dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN HIBAH SEBAGAI CARA MENSIASATI PEMBAGIAN HARTA WARISAN (DI DESA KUALA KERITANG KEC. KERITANG KAB. INDRAGIRI HILIR RIAU).**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna sesuai dengan apa yang

¹⁰ Bpk. Amiruddin, Sekretaris Desa Kuala Keritang, Wawancara, Kamis, Tanggal 06 Desember 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan maka penulis memberikan batasan penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan, yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisandi Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisandi Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat Penelitian

- a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu.
- b. Sebagai sarana bagi penulis dalam memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat tentang penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan..
- c. Untuk dapat meningkatkan kemampuan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis dalam hukum Islam tentang hibah.
- d. Untuk sumbangan pemikiran dalam mendekripsikan fenomena yang ada dalam masyarakat.
- e. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1, Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologis yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu menyusun mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau, kemudian yang didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu terletak di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau. Selain itu lokasi penelitian ini terletak di daerah tempat tinggal penulis, sehingga penulis dapat meneliti dengan mudah.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah keluarga yang melaksanakan penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan dan tokoh masyarakat Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau.

b. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan.

4. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu 1 orang tokoh agama, 1 orang tokoh masyarakat, 2 orang perangkat desa dan 31 kepala keluarga yang melaksanakan pembagian harta di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau. Karena banyaknya populasi dari kepala keluarga yang melaksanakan pembagian harta di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau, maka penulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil 20% dari 31 kepala keluarga untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu 6 kepala keluarga. 4 kepala keluarga yang melaksanakan pembagian harta sebelum orang tua meninggal dan 2 kepala keluarga yang melaksanakan pembagian harta secara waris. Berdasarkan data tersebut maka penulis mengambil sampelnya dengan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang ditentukan oleh penulis sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini.

5. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para responden yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu merupakan data yang dikumpulkan penulis guna mendukung data primer, ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, dan jurnal-jurnal, yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
- c. Sumber data tersier, yaitu data yang diambil sebagai tambahan yang memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti kamus, ensiklopedia dan internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden¹¹ yaitu penulis mengajukan pertanyaan kepada keluarga yang melaksanakan penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan dan tokoh masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan dan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Adapun dokumentasi pada penelitian ini adalah dokumentasi berupa buku, dan skripsi serta foto-foto responden yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kualitatif yakni data yang penulis peroleh, lalu penulis olah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas

¹¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999), cet. ke-4, h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan rinci. Setelah data berhasil dikumpulkan, diteliti mengenai kejelasannya, lalu data tersebut dianalisa dengan cara membandingkan data primer dengan data sekunder sehingga diperoleh hasil perbandingan antara teori dan praktek.

8. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini penulis berpedoman padabuku panduan penyusunan skripsi Fakultas Syri'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Adapun teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan secara umum
- b. Metode Deduktif, yaitu pembahasan dimulai dari uraian-uraian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** Pendahuluan, bab ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti, yakni terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Gambaran secara umum tentang lokasi penelitian, dalam pembahasan ini dipaparkkan tentang sejarah lokasi penelitian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

geografis, demografis, agama, pendidikan, kebudayaan dan struktur pemerintahan.

Tinjauan Teoritis tentang hibah dan waris meliputi ; pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, hikmah hibah, pengertian waris, rukun dan syarat waris, asas hukum waris, sebab-sebab kewarisan, ahli waris, dan hibah hubungannya dengan kewarisan.

BAB IV

Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian warisan, dalam bab ini memaparkan hasil penelitian yaitu, menganalisis penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisandi Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau, dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisandi Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau.

BAB V

Penutup meliputi, kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN SECARA UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Kuala Keritang

Desa Kuala Keritang terletak disebelah Barat Kota Baru, ibu kota Kecamatan Keritang ± 10 kilometer jarak empuhnya dari desa menuju ibu kota Kecamatan. Desa Kuala Keritang terletak dipinggir sungai gansal dan wilayahnya dibelah oleh sungai Keritang.

Desa Kuala Keritang resmi menjadi desa devinitif sekitar tahun 1963 pecahan dari desa induk yaitu desa Keritang. Sebelum dimekarkan desa Kuala Keritang masih perwakilan desa, dengan kepala perwakilan desa pertama mangku jungas dan perawkilan desa terakhir mangku anang. waktu itu pemerintahan daerah masih kabupaten indragiri yang berkedudukan di Rengat, sedangkan desa Keritang masih dibawah kecamatan seberida yang ibu kotanya pangkalan kasai.

Adat budaya di desa Kuala Keritang adalah adalah budaya Melayu yang bernuansa Islami, karena suku yang pertama kali bermukim didesa kuala keritang adalah suku melayu. Perekonomian masyarakat pada waktu itu cukup baik dengan mata pencarian mereka bertani, mencari ikan di sungai, selain dari itu mencari hasil hutan seperti rotan, damar, dan kemenyan. Usaha bidang perkebunan pada waktu belum ada. Pendidikan waktu itu sangat minim baru ada sekolah rakyat (RT) itupun swsata. Agama sejak dari dahulu penduduk desa Kuala Keritang beragama Islam. Alat tranportasi umumnya ada waktu itu

menggunakan sampan rakit. Masalah perdagangan waktu itu belum lancar karena keterbatasan alat transportasi dan juga jauhnya pusat perdagangan seperti di Rengat dan Tembilahan, seperti menjual hasil hutan mereka harus ke Rengat memakan waktu 3 hari. Sedangkan menjual hasil tangkapan ikan mereka ke Pulau Kijang atau ke Tembilahan juga memakan waktu 2 sampai 3 hari.

Sejak dimekarkan desa Kuala Keritang pada tahun 1963 Kepala Desa pertama adalah :

1. Sulaiman Tahun 1963 s/d 1968
2. Masykur Tahun 1968 s/d 1975 (dihentikan karena menyalahgunakan wewenangnya)
3. M. Arsyad Pjs Tahun 1975 s/d 1976 (Staf Camat Reteh)
4. Agus Mursi Pjs Tahun 1976 s/d 1978 (staf Camat Reteh)
5. Masykur dari hasil pemilihan Kepala Desa secara kerekter dari tahun 1978 s/d 1986. April 1986 Masykur meninggal dunia di Jambi dalam rangka berobat.
6. Aswari Ahmad dari Sekretaris Desa yang di tunjuk sebagai Pjs dari Tahun 1986 s/d 1989. Pada Tanggal 5 Juli 1989 Aswari ahmad resmi menjadi Kepala Desa Kuala Keritang dari hasil pemilihan Kepala Desa, berakhir September 1997. April 1998 Aswari Ahmad terpilih kembali sebagai kepala desa Kuala Keritang pada Periode ke II s/d 2007.
7. Kaharudi Bin Masykur menjadi kepala desa kuala keritang September 2007 dari hasil pemilihan kepala desa kuala keritang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Yudi Saputra Pjs dari Juni 2015 s/d Januari 2016 (Satpol PP Kec. Keritang)

9. M. Idris S.E Tahun 2016 s/d 2022

B. Geografis

Desa Kuala Keritang memiliki kondisi geografis dengan tipologi daerah dataran dan didominasi oleh tanah gambut dan tanah liat. Desa ini terletak lebih kurang 10 kilometer dari Kecamatan Keritang, 85 kilometer dari ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir, 499 kilometer dari ibu kota Provinsi Riau.¹²

Desa ini dihuni oleh berbagai macam suku bangsa, dan luas daerahnya mencapai 77,39 ha yang mempunyai keadaan tanah yaitu tanah liat dan gambut. Ini sangat dimanfaatkan oleh penduduk setempat atau luar yang mempunyai hak kepemilikan tanah desa ini untuk mengelolah tanah sesuai dengan kondisi keadaan tanah yang dimiliki desa ini. Seperti untuk pertanian untuk daerah tanah gambut, perkebunan jagung, palawija, sawit, kelapa dan lain-lain.¹³

Adapun wilayah Desa Kuala Keritang dibagi menjadi 7 dusun yaitu:

- a. Dusun Berkat
- b. Dusun Sungai Intan
- c. Dusun Meranti Jaya
- d. Dusun Binaraya

¹² Bpk Abd Razak, Sekretaris Desa Kuala Keritang, Wawancara, 04 Februari 2019.

¹³ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dusun Semoga Jaya

Dusun Mekar Jaya

Dusun Harapan¹⁴

Dan adapun batas Desa Kuala Keritang adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan kempas
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan kemuning
- Sebelah barat berbatasan dengan desa kuala leman dan Desa Sekara
- Sebelah timur berbatasan dengan desa pasar kembang dan desa mekar sari

C. Demografis

Jumlah penduduk yang mendiami Desa Kuala Keritang berjumlah 4378 jiwa atau 1072 KK. Dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Klasifikasi penduduk Desa Kuala Keritang sebagai mana di atas penulis akan menyajikan dengan menggunakan system tabulasi sebagai berikut:

¹⁴ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.6
KLASIFIKASI PENDUDUK DESA KUALA KERITANG
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No.	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	2233 Jiwa
2	Perempuan	2145 Jiwa
	Jumlah	4378 Jiwa

Sumber Data: Kantor Desa Kuala Keritang

Sebagaimana dalam tabel di atas jelaslah bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih sedikit yang ada di Desa Kuala Keritang jika di bandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk maka Desa Kuala Keritang termasuk desa yang terdapat di Kecamatan Keritang yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi.

D. Agama

Agama mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di dunia ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai ke tempat tujuan. Untuk itu agama dijadikan sebagai petunjuk dan tuntutan di dalam kehidupan manusia.¹⁵

Penduduk Desa Kuala Keritang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

¹⁵ Bpk Syakur, Tokoh Agama, *Wawaancara*, 05 Februari 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.7

**KLASIFIKASI PENDUDUK DESA KUALA KERITANG
BERDASARKAN JENIS AGAMA DAN PENGANUTNYA**

No.	JENIS AGAMA	JUMLAH PENGANUTNYA
1	Islam	4378 jiwa
2	Budha	-
3	Kristen	-
4	Hindu	-
Jumlah		4378 Jiwa

Sumber Data: Kantor Desa Kuala Keritang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Islam dianut seluruh masyarakat Desa Kuala Keritang yaitu 4378 Jiwa (100 %) dari komposisi penduduk yang ada, maka sudah semestinya nilai-nilai Islam itu membudaya dalam kehidupan masyarakat.

Kehidupan keagamaan berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan berbagai bidang, hal ini terbukti dengan terdapatnya sejumlah rumah ibadah yaitu 5 buah mesjid dan 17 buah mushalla. Rumah ibadah tersebut selain digunakan untuk kegiatan ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar Al-Qur'an dan wirid pengajian dan kegiatan agama lainnya.

Tabel 2.8

SARANA PERIBADATAN DESA KUALA KERITANG

No.	SARANA IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	5 Buah
2	Mushallah	17 Buah
3	Gereja	-
Jumlah		22 Buah

Sumber Data: Kantor Desa Kuala Keritang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah lembaga keagamaan di Desa Kuala Keritang adalah sebanyak 5 buah Mesjid, dan 17

buah Mushalla, dan gereja tidak ada. Dari data diatas jelas bahwa di Desa Kuala Keritang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Pendidikan

Penduduk Desa Kuala Keritang sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah menduduki pendidikan di sekolah negeri dan swasta.¹⁶

Pendidikan merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut, begitupula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah tersebut.¹⁷

Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Kuala Keritang bisa dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.9
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI DESA KUALA KERITANG

No.	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	PAUD	1 Buah
2	Sekolah Dasar / MI	7 Buah
3	MDA/TPA	-
4	SLTP/MTs	2 Buah
5	SLTA	1 Buah
Jumlah		11 Buah

Sumber Data: Kantor Desa Kuala Keritang

¹⁶ Bpk M. Idris, Kepala Desa Kuala Keritang, *Wawancara*, 04 Februari 2019.

¹⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di Desa Kuala Keritang terdapat satu unit PAUD (Buah Hati As'ad) , Tiga unit Sekolah Dasar, yang mana 2 unit sekolah dasar negeri (SD 008 Kuala Keritang RT. 003 dan SD 029 Parit Usaha Berkat) , 1 unit sekolah dasar swasta (SD Swasta Prt. 6) dan tiga unit madrasah ibtdaiyyah (MI), Mi nurul wathan, usaha makasar, Mi as'ad parit sei.beringin jaya, dan Mi nurul ihsan prit mutiara. Satu unit SMP (SMP Satu Atap Usaha Berkat). Dua unit Madrasah Tsanawiyah(Mts),Mts nurul ihsan prt. Sei.beringin jaya dan mts nurul wathan prt.mase-mase dan Satu unit Pesantren (Pesantren Tegal Rejo). Dan desa Kuala Keritang tidak terdapat TPA akan tetapi anak-anak belajar mengaji dan agama pada malam hari atau setelah magrib di mesjid-mesjid atau musholla, atau dirumah ustadz atau tokoh agama setempat, maka disitulah anak-anak belajar Al-Qur'an.

Meskipun sarana pendidikan di Desa Kuala Keritang ini sangat minim, namun tidak menyurutkan keinginan mereka untuk menuntut ilmu ke desa sebelah bahkan ke kabupaten/kota, dan di sanalah mereka melangsungkan sekolah mereka, mereka mempunyai semangat yang kuat terhadap pendidikan yang tinggi demi cita-cita yang ingin dicapai sekalipun tempatnya cukup jauh dari desa mereka.¹⁸

Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di desa ini, banyaknya sarana pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah kepada tingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan prasarana yang ada

¹⁸ Ibid

melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi sampai ke kota-kota besar lainnya, demi cita-cita yang mulia.¹⁹

Hal ini terlihat dari banyaknya penduduk yang telah menamatkan bangku sekolah. Berikut ini dapat dilihat dari table

Tabel 2.10
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT
DESA KUALA KERITANG

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	TK/PAUD	16 Jiwa
2	SD/MI	468 Jiwa
3	SLTP/MTS	150 Jiwa
4	SLTA.MA	100 Jiwa
5	S1/ Diploma	90 Jiwa
6	Putus Sekolah	1030 Jiwa
7	Buta Huruf	100 Jiwa
JUMLAH		1961 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Kuala Keritang

Table diatas menunjukkan bahwa hampir sebagian masyarakat desa Kuala Keritang sudah menamatkan bangku sekolah, sedangkan yang melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi tidak banyak. Hal tersebut terjadi karena letak perguruan tinggi yang ada jaraknya jauh dari desa tersebut sehingga mereka lebih memilih tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi.

Adapun perekonomian masyarakat desa Kuala Keritang yaitu, mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Lancar atau tidaknya segala sesuatu sebagian besar ditentukan oleh faktor ekonomi. Ekonomi atau mata pencaharian masyarakat desa Kuala Keritang sebagian besar adalah pekebun dan pertanian.

¹⁹ Ibid

Tabel 2.6
JENIS PEKERJAAN MASYARAKAT
DESA KUALA KERITANG

NO.	JENIS PEKERJAAN
1	Petani
2	Pekebun
3	Guru
4	Bidan
5	Sopir
6	Swasta/Pedagang
7	Tukang
8	PNS

Sumber : Kantor Desa Kuala Keritang

Berdasarkan tabel di atas bahwa kebanyakan masyarakat yang ada di desa Kuala Keritang adalah seorang petani dan merangkap juga sebagai pekerjaan yang lain sehingga tidak bisa disebutkan jumlah orang pada setiap jenis pekerjaan di atas. Seperti meskipun mereka PNS ataupun pekerja yang lain akan tetapi tetap sebagai petani juga.²⁰

F. Kebudayaan

Masyarakat Desa Kuala Keritang memiliki rasa toleransi dan saling tolong menolong yang terjalin dengan baik. Mereka saling tolong menolong apabila ada salah satu masyarakat yang memerlukan bantuan, mereka dengan senang hati membantunya, meakipun di desa ini memiliki banyak suku diantaranya Bugis, Melayu, Jawa, dan Banjar.

Hal ini mampu membuat masyarakat tersebut untuk bisa mengenali karakter suku lain yang saling menghormati dan menghargai di dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan terjalin rukun dan damai sangat baik sekali

²⁰ Bpk Tamsir, Kepala Dusun Berkat, Desa Kuala Keritang, Wawancara, 04 Februari 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa melihat latar belakang suku, sehingga mereka dapat berbaur satu sama lainnya. Kondisi sosial dan adat-istiadat masyarakat di Desa Kuala Keritang sangat mewarnai kehidupan sehari-hari mereka. Namun, mereka tetap saling menjaga adat yang dimiliki dalam acara tertentu seperti acara pernikahan, khataman, santunan anak yatim, aqiqah, kematian, hari-hari besar agama Islam dan lain-lain.

Desa Kuala Keritang mengutamakan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat atau orang yang disegani dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat yang ada di Desa Kuala Keritang.²¹ Adat istiadat merupakan salah satu dari ciri setiap masyarakat berada. Diantara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki adat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul.

Yang dimaksud adat dalam pengertian umum ialah segala sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum atau golongan. Adat kebiasaan ada banyak macamnya, ada yang berhubungan dengan muamalah, ada yang berkenaan dengan akhlak, yang berkenaan dengan cara berpakaian, cara hidup bersama²² dan kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf memberikan pengertian tentang adat adalah suatu yang dibiasakan oleh manusia senantiasa mereka kerjakan atau mereka tinggalkan baik perkataan maupun perbuatan.²³

²¹ Bpk Tamsir, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 05 Februari 2019.

²² Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung, PT. Al-Ma'arif, tt), h. 190-191.

²³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press. 1976), Cet ke-1, h. 89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa adat istiadat suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa diikuti oleh daerah lain atau masyarakat disaat itu dan masyarakat sesudahnya.

Penduduk Desa Kuala Keritang mayoritas penduduknya adalah suku bugis sebagai suku pendatang, terdapat juga suku lain seperti jawa, dan banjar dari tempat asal mereka, masing-masing membawa adat tradisi yang berbeda dengan penduduk suku asli desa ini.

Namun hal itu tidak menjadi perpecahan bagi masyarakat Desa Kuala Keritang, karena pada umumnya adat yang dibawa masyarakat pendatang tidak jauh berbeda, sehingga mereka tidak membedakan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Dan mereka dapat hidup rukun dan damai, meskipun masyarakat Desa Kuala Keritang mengadakan acara menurut adat masing-masing, seperti pernikahan, khitanan, aqiqah, dan lain sebagainya. Mereka tetap senang menghadiri undangan walaupun beda suku atau berbeda adat.

Adapun dalam rangka menyambut hari-hari besar Islam, mereka selalu mengadakan acara di mesjid atau musholla untuk memperingatinya, seperti tahun baru Islam, Maulid Nabi mereka akan berkumpul mengadakan acara seperti membuat tabak (bunga dan telur) pada masing-masing rumah mereka sebagai rasa syukur dan kebahagiaan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad dan Isra’ dan Miraj mereka memperingatinya di mushallah-mushallah, dan ketika masuk pada malam nish fu Sya’ban masyarakat Desa

Kuala Keritang berbondong-bondong datang ke mushallah dan masjid dengan membawa kue dari rumah masing-masing untuk di makan bersama di mushallah atau mesjid, dan begitu juga ketika pada pertengahan di bulan Ramadhan.²⁴

Namun untuk acara perkawinan adat istiadat sangat didahulukan oleh masyarakat Desa Kuala Keritang, dalam pernikahan mereka melakukan pernikahan sesuai dengan adat suku masing-masing, seperti suku bugis mereka melakukan pernikahan sesuai adat mereka yang mereka bawa dari Sulawesi, suku jawa mereka melakukan resepsi pernikahan sesuai adat jawa yang mereka bawa dari asal kampung mereka yaitu dari jawa, dan begitu suku banjar, mereka melaksanakan resepsi sesuai suku adat mereka bawa dari daerah asal mereka. Namun demikian mereka tetap hidup rukun, damai, dan saling menghargai.²⁵

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴ Bpk Tamsir, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 05 Februari 2019.

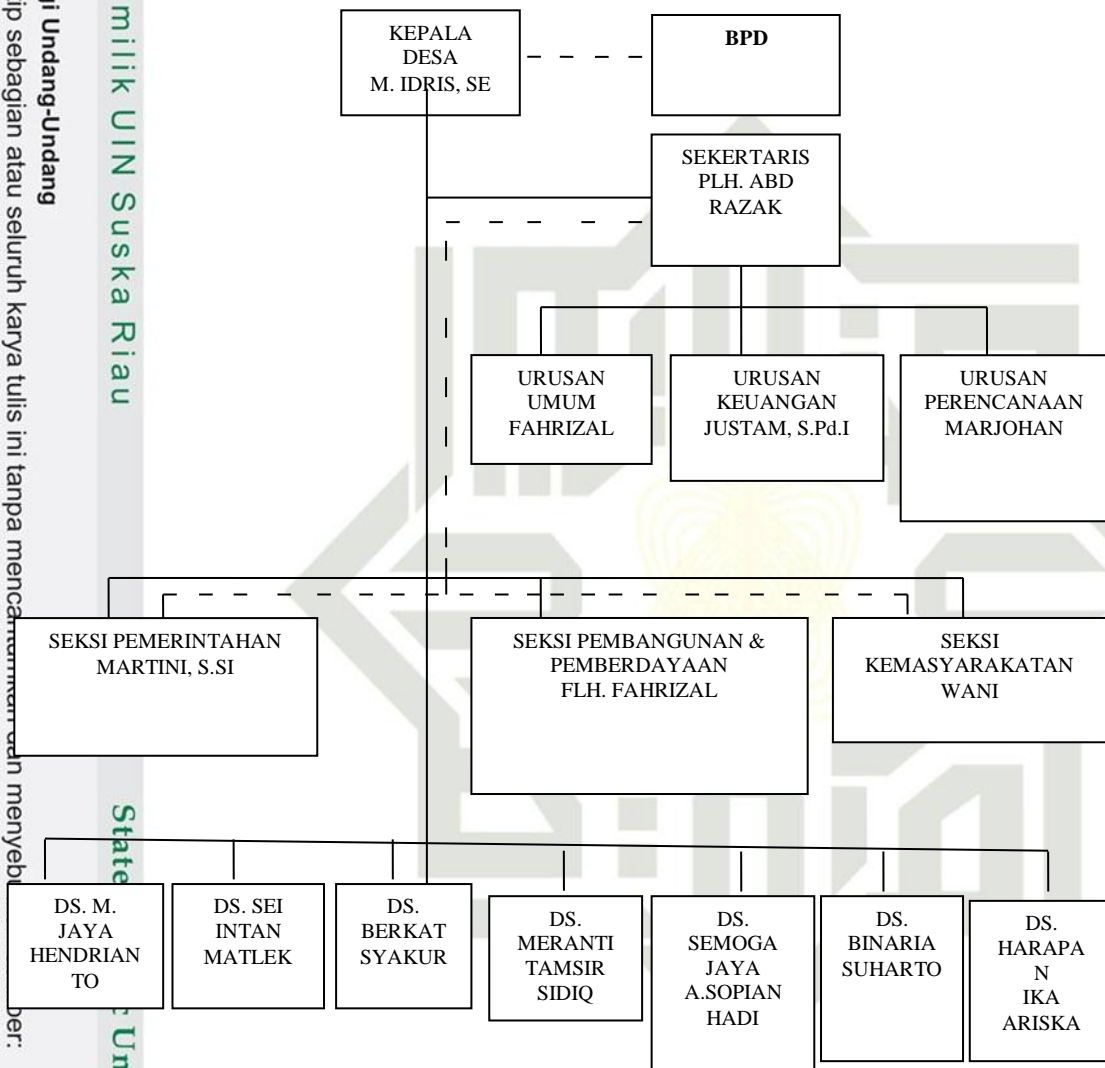
²⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Struktur Pemerintahan

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau



Sumber Data: Kantor Desa Kuala Keritang

Ket : Garis komando/tanggung jawab : —————

Garis koordinasi : - - - - -

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG HIBAH DAN WARIS

A. Pengertian Hibah

Kata hibah adalah bentuk *mashdar* dari kata *wahaba*. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subjeknya Allah memberi karunia, atau menganugrahi sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-‘Imran [3]:8, QS. Maryam [19]: 5, 49, 50, dan 53.²⁶

Firman Allah Subhanahu Wata’ala dalam Surah Al-‘Imran[(3) ayat 8:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

Artinya : “(mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)"(QS. Al-‘Imran [3]:8)²⁷

Firman Allah Subhanahu Wata’ala dalam Surah Maryam [19] ayat 5 :

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَأْيِ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾

Artinya : “Dan Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku²⁸ sepeninggalaku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, Maka anugerahilah aku seorang putera”(QS. Maryam [19]: 5)²⁹

Hibah secara bahasa berasal dari kata “*wahaba*” yang berarti lewat dari suatu tangan ke tangan yang lain atau dengan arti lain kesadaran untuk

²⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet.ke-1, h. 275.

²⁷ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Komplek Percetakan Al-Qur'an Al-Karim, 1971), h. 76.

²⁸ Yang dimaksud oleh Zakaria dengan mawali ialah orang-orang yang akan mengendalikan dan melanjutkan urusannya sepeninggalnya. Yang dikhawatirkan Zakaria ialah kalau mereka tidak dapat melaksanakan urusan itu dengan baik, karena tidak seorangpun diantara mereka yang dapat dipercayainya, oleh sebab itu Dia meminta dianugerahi seorang anak.

²⁹ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Komplek Percetakan Al-Qur'an Al-Karim, 1971), h. 462.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubuub ar-riih* (angin berhembus) dikatakan dalam kitab *Al-Fath*, diartikan dengan makna yang lebih umum berupa *ibra'* (membebaskan utang orang), yaitu menghibahkan utang orang lain dan sedekah yaitu menghibahkan sesuatu yang wajib demi mencari pahala akhirat, dan *ja'aalah* yaitu sesuatu yang wajib diberikan kepada orang lain sebagai upah, dan dikhususkan dengan masih hidup agar bisa mengeluarkan wasiat, terbagi kepada tiga jenis, hibah dipakai untuk menyebutkan makna yang lebih khusus daripada sesuatu yang mengharap ganti, dan dengan ini sangat tepat dengan ucapan orang yang mengatakan hibah adalah pemberian hak milik tanpa ganti, dan inilah makna hibah menurut syara'.³⁰

Hibah menurut terminologi syara' adalah "pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi." Atau kita katakan: "pemberian hak milik secara suksrela ketika masih hidup dan yang ini lebih utama dan singkat."³¹ Dalam referensi lain dijelaskan juga hibah menurut istilah adalah pemberian kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*'aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.³²

Pengertian hibah menurut terminologi syari'at Islam adalah :

عَقْدٌ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ بِلاَ عَوَضٍ حَالِ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

Artinya : "Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela".³³

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), cet. ke-1, h. 435.

³¹ *Ibid*, h. 435-436.

³² Ahmad Rafiq, *Loc. Cit.*

³³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), cet. ke-4, h. 242.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu hibah diartikan sebagai pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.³⁴ Dalam rumusan kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf g juga dirumuskan pengertian hibah yaitu, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hibah adalah suatu pemberian yang berupa benda yang diberikan kepada orang lain sebagai hak milik atas benda tersebut, yang pemberian tersebut tidak mengharapkan imbalan dari si penerima.

Adapun dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah ialah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya di antara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah masih hidup dengan tujuan untuk menghindarkan perpecahan yang akan terjadi apabila ia telah meninggal dunia di antara anak-anaknya itu.³⁶

Imam Abu Yusuf al-Hanafi, ia berpendirian membolehkan meninggalkan dalil dan mengikuti adat istiadat, jika adat istiadat itu dipandang

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2013), cet.ke-2, h.343.

³⁵ Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Op. Cit*, h.82.

³⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet.ke-2, h.132.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai dasar dalil. Hal ini dilandaskan atas hadits Nabi tentang, jelai atau jawwat, dengan menetapkannya termasuk biji-bijian yang di gantang, karena begitulah yang berlaku pada zaman Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, pada zaman Abu Yusuf kebiasaan itu berubah dan *jawwat* itu digolongkan dengan biji-bijian yang ditimbang. Oleh sebab itu, wajib dirubah hukum tadi kaena perubahan adat. Kemudian Imam Al-Qrafi dari golongan Maliki mengikuti pendirian Imam Abu Yusuf itu, yaitu ketika ia berfatwa bahwa hukum segala sesuatu di dalam syari’at yang di dasarkan pada adat-istiadat akan berubah dengan perubahan adat istiadat itu dan di sesuaikan dengan adat istiadat yang baru.³⁷

Hibah dalam hukum Islam dilihat dari bentuknya dapat dibedakan atas 4 (empat) macam, yaitu hibah *umra*³⁸, hibah *ruqbah*³⁹, hibah *bil-Iwadt*⁴⁰, dan hibah *bisysyarth al-iwadt*⁴¹. Keempat hibah yang disebutkan ini, sah dilakukan bila kedua belah pihak (pemberi dan penerima hibah) melakukannya secara ikhlas sepanjang memenuhi syarat-syarat barang atau harta yang hibahkan.⁴² Hibah yang dimaksud, bila dikaitkan dengan hukum kewarisan hukum Islam,

³⁷ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), d.1, cet.ke-1, h.29-30.

³⁸ *‘umra*, yaitu semacam hibah, yaitu bila seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain selama dia hidup, dan bila yang diberi hibah itu mati, maka barang itu kembali lagi kepada penghibah.

³⁹ *Ruqbah*, yaitu bila seseorang berkata kepada orang lain barang itu menjadi milik siapa yang masih hidup di antara aku dan engkau.

⁴⁰ *Hibah Iwadt*, yaitu memberikan kepada orang lain yang bertujuan untuk mengharapkan imbalan atau pengganti atas sesuatu yang dihibahkan kepadanya.

⁴¹ Hibah *bisysyarth al-iwadt* yaitu, hibah yang dihubungkan dengan suatu persyaratan.

⁴² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) Cet.ke-2, h. 77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbatas dari segi kemungkinannya berfungsi sebagai suatu yang dapat mengatasi timbulnya perasaan ketidak adilan ketika pembagian harta warisan. Dalam hal ini, ahli waris karena suatu sebab terhalang mendapatkan harta warisan dari seseorang (jika di kemudian hari dia meninggal), maka baginya terbuka kemungkinan untuk mendapat hibah dari yang bersangkutan (calon pewaris) sebelum ia meninggal.

Mencermati beberapa pengertian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Hibah demikian dapat diperhitungkan sebagai warisan, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang telah dipaparkan pada bab 1 dan menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini.

B. Dasar Hukum Hibah

Al-Qur'an banyak sekali menggunakan istilah yang konotasinya menganjurkan agar manusia yang telah dikarunia rezeki itu untuk mengeluarkan sebagaiannya kepada orang lain. Berikut dasar hukum yang berkaitan dengan hibah.

Dasar Hukum Hibah ini adalah firman Allah QS. Al-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”⁴³

⁴³ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Komplek Percetakan Al-Qur'an Al-Karim, 1971), h. 92.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas berisi tentang memberikan harta yang dicintai dengan tujuan untuk mencapai kebajikan, yang dalam tafsir makna kabajikan yang sempurna itu adalah surga.

Dasar hukum hibah adalah Firman Allah Subhanahu Wata'ala, QS.

AL-Baqarah : [2]: 262 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya : “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala dari Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. AL-Baqarah : [2]: 262)⁴⁴

Ayat di atas diturunkan berkenaan dengan datangnya Utsman bin Affan dan Abdul Rahman bin ‘Auf kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam., dengan membawa dirham untuk dinafkahkan kepada pejuang yang berjuang yang terlibat dalam perang Tabuk. Abdul Rahman bin ‘Auf membawa 4.000 dirham dan berkata kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. : “aku memiliki 8.000 dirham lalu seperduanya ini aku persembahkan kepada Allah”.⁴⁵

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 177

... وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ ... ﴿١٧٧﴾

⁴⁴ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Komplek Percetakan Al-Qur'an Al-Karim, 1971), h. 66.

⁴⁵ https://www.academia.edu/10822593/Tafsir_Surah_al-Baqarah_Ayat_261-265_Saudi_Komparasi_Penafsiran_Ulama_Tentang_Balasan_dan_Etika_Berinfak_atau_Sedekah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, ...”(QS. Al-Baqarah [2]: 177)⁴⁶

Potongan ayat di atas tentang menyedekahkan harta padahal sangat dicintai dan disenanginya. Demikian dinyatakan oleh Ibnu Mas’ud bin Jubair, dan lainnya, dan sebagaimana diriwayatkan dalam kitab shahih al-Bukhhari dan Muslim, hadits marfu’ dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu., Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “sebaik-baik sedekah adalah engkau menyedekahkan harta sedang engkau dalam keadaan sehat dan tamak, engkau menginginkan kekayaan dan takut miskin” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).⁴⁷

Selain dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an juga terdapat dalam hadits sebagaimana yang terdapat dalam Syarah Shahih Imam Muslim oleh Imam An-Nawawi, berikut ini :

عَنْ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بَعْضَ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتَلِقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بَوْلِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَعِدُّوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. (رواه البخاري، أبو داود، التَّسَاعِي، و ابن ماجه)

Artinya : “Dari Nu’mān bin Basyir, ia berkata : ayahku memberiku sedekah dar sebagian hartanya. Ibuku, Amrah binti Rawahah berkata, “aku tidak setuju sampai engkau memperlihatkannya kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.” Lalu ayahku pergi menghadap Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam agar beliau menjadi saksi sedekahnya kepadaku. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, “Apakah engkau melakukan ini kepada semua anak-anakmu?” Ayahku menjawab, “Tidak”. Beliau

⁴⁶ Kementrian Agama, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah Hadits*, (Bandung : Cordoba, 2018), h. 43.

⁴⁷ <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/06/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-177/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersabda, “bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada semua anak-anakmu.” Kemudian ayahku pulang dan mengambil kembali sedekahnya.” (H.R. Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah).⁴⁸

Hadits di atas merupakan dalil yang mewajibkan untuk berlaku adil dalam memberikan hibah dari orang tua kepada anak-anak, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Ats-Tsauri dan lainnya. Hibah yang diberikan secara tidak adil kepada anak-anak hukumnya bathil. Hukum ini di *istinbathkan* dari perintah Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam., untuk mengambil hibah tersebut dan dari sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, “Bertakwalah kepada Allah, berlaku adil terhadap anak-anakmu,” sabdanya, “kalau begitu, jangan kamu lakukan,” dan juga sabdanya, “saya tidak mau menjadi saksi dalam perbuatan zhalim.”

C. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut Ibnu Rusy dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* sebagaimana dikutip oleh Jaziri mengemukakan bahwa rukun hibah ada tiga yang esensial yaitu :

1. Orang yang menghibahkan arau *al-wahib*
2. Orang yang menerima hibah atau *al-mauhublah*
3. Pemberiannya atau perbuatan hibah atau disebut juga *al-hibah*.

Sedangkan Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa di samping hal-hal yang telah disebutkan, hibah baru dianggap sah haruslah melalui ijab kabul,

⁴⁸ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2013), cet.ke-2, h. 32-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya penghibah berkata : aku hibahkan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, atau yang serupa dengan kalimat tersebut, sedangkan si penerima hibah berkata, ya aku terima. Pendapat yang mewajibkan ijab kabul adalah sejalan dengan pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan juga pengikut-pengikut imam Hambali, sedangkan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa dengan ijab saja sudah cukup, tidak perlu diikuti dengan kabul, dengan perkataan lain bahwa hibah tersebut pernyataan sepihak.⁴⁹

Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat, yaitu *wahib* (pemberi), *mauhub lah* (penerima), *mauhub* (barang yang dihibahkan), dan *shighat (ijab dan qabul)*⁵⁰, berikut penjelasan rukun dan syarat hibah⁵¹ :

1. Orang yang menghibahkan

Disyaratkan bagi penghibah syarat-syarat sebagai berikut⁵² :

- a. Penghibah memiliki apa yang dihibahkan
- b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
- c. Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya
- d. Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahan.
- e. Dalam keadaan sehat⁵³

⁴⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008) Ed. 1, Cet.ke-2, h. 133-134.

⁵⁰ Rachmat Syafei, *Op. Cit*, h.244.

⁵¹ Ahmad Rafiq , *Op.Cit*, h. 378-380.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemah oleh Kamaluddin A. Marzuki, jilid, 12, (Bandung : PT Alma'arif, 1987), Cet.ke-1, h. 179-180.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Memiliki kebebasan untuk menghibahkan bendanya itu.

2. Benda yang dihibahkan

Disyaratkan bagi benda yang dihibahkan⁵⁴ :

- a. Benar-benar ada.
- b. Harta yang bernilai.⁵⁵
- c. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.
- d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- e. Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat tidak disyaratkannya syarat ini. Sesungguhnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah. Bagi golongan Maliki, boleh menghibahkan apa yang tidak sah dijual seperti unta liar, buah belum nampak hasilnya, dan barang hasil ghasab,

⁵³ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* h.378.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* h. 179.

⁵⁵ Orang-orang Hambali berpendapat sahnya menghibahkan anjing, piarzan dan najis yang boleh dimaafkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh dihibahkan, karena dia adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik terhadap satu barang, maka dia bisa memiliki sesuatu yang bisa dimilikinya dengan cara jual beli, sehingga setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan sebagiannya walaupun barang tersebut banyak.⁵⁶

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim. Dengan demikian, dapat dibatalkan oleh pemberi sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, dari Abu Hurairah : “ *pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti*”. Dengan demikian dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan , akan tetapi dihukumi makruh sebab perbuatan tersebut termasuk menghina si pemberi hibah. selain itu, yang diberi hibah harus ridho, hal itu diibaratkan adanya cacat dalam jual beli setelah barang dipegang pembeli.

Menurut ulama Malikiyah bahwa barang yang telah diberikan , jika sudah dipegang tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki utang.

Ulama Hanabilah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa hibah tidak dapat dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, : “ orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang mengembalikan muntahnya”.⁵⁷

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit*, h.445.

⁵⁷ Rahmad Syafei, *Op. Cit*, h. 248-249.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun mengenai Harta yang dihibahkan boleh langsung dikuasai (*qabd*) oleh penerima hibah. oleh ulama Mazhab Hanafi dan sebagian ulama Mazhab Hanbali, syarat ini dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, berpendapat bahwa *qabd* merupakan syarat terpenting sehingga hibah dikatakan tidak sah dan mengikat apabila syarat ini tidak terpenuhi. Akan tetapi ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa *qabd* hanyalah syarat penyempurna saja karena dengan adanya akad hibah berarti hibah tersebut telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *qabd* ini, maka ulama Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hibah belum sah hanya dengan ijab dan kabul saja, tetapi harus dibarengi dengan *qabd* sekalipun secara hukum. Umpamanya apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *qabdn*ya adalah dengan menyerahkan surat-surat tanah itu kepada orang yang menerima hibah.

Adapun *qabd* (penguasaan terhadap barang hibah) terbagi atas dua macam, *pertama*, *qabd* secara langsung yaitu penerima langsung menerima harta yang dihibahkan. *Kedua*, *qabd* melalui kuasa hukum yaitu, apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak tahu atau belum cakap bertindak hukum maka yang menerima hibahnya adalah walinya dan apabila harta yang dihibahkan itu berada ditangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan ditanggannya atau barang itu diambilnya tanpa izin (*gasab*) maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *qabd* karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah.⁵⁸

⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996) Jilid 11, cet.ke1, h.541.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Orang yang menerima hibah

Orang yang diberi hibah disyaratkan :

- a. Pada dasarnya setiap orang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah.
- b. Anak-anak atau mereka yang berada di bawah pengampuan (kuratele) juga dapat menerima hibah melalui kuasa (wali) nya.⁵⁹ Apabila orang yang diberi hibah itu ada diwaktu pemberian hibah, akan tetap dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.⁶⁰
- c. Penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan.⁶¹ Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah.⁶²
- d. Penerima hibah agar memiliki kelayakan memiliki terhadap apa yang diberikan ke padanya berupa *taklif* (beban).⁶³

Orang yang bertindak sebagai penerima hibah harus sudah benar-benar ada. Sehingga bayi di dalam kandungan tidak diperkenankan menerima hibah. Sebagai penerima hibah ia tidak dipersyaratkan harus sudah dewasa atau berakal sehat.

⁵⁹ Ahmad Rafiq, *Op. Cit*, h. 380.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit*.

⁶¹ Abdul Manan, *Op. Cit*, h.135.

⁶² Sayyid Sabiq, *Loc. Cit*.

⁶³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit*, h.442.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila seseorang menderita sakit yang menyebabkan kematian, sedang ia menghibahkan kepada orang lain. Maka hukum hibahnya itu seperti wasiatnya. Apabila ia menghibahkan kepada seseorang diantara ahli waris, kemudian dia mati. Sedang ahli waris yang lain mendakwakan bahwa dia menghibahkan kepadanya dalam keadaan sakit dan menyebabkan kematian, dan yang menerima hibah mendakwa bahwa hibah itu diberikan kepadanya diwaktu penghibah sehat, maka orang yang diberi hibah wajib memperkuat kata-katanya bila ia tidak memperkuat kata-katanya maka dia dianggap hibah itu diberikan pada saat sakit. Dan hukum yang berlaku untuk itu adalah bahwa hibah tidak sah kecuali bila diperbolehkan oleh semua ahli waris.⁶⁴

Apabila pemberi hibah menghibahkan harta kepada ahli warisnya saat pemberi hibah itu sakit, kemudian ia sehat kembali, kemudian sakit lagi. Lalu hibah itu diberikan pada saat ia masih sakit, hingga pemberi hibah meninggal dunia karena sakitnya tersebut. Maka hibah itu ditolak. Karena sesungguhnya hibah itu sempurna dengan penerimaan jika keduanya masih sama-sama hidup.

Adapun jika pemberi hibah menghibahkan hartanya dalam keadaan sakit. Kemudian diserahkan hibah itu saat si pemberi hibah sehat. Kemudian setelah penyerahan dilakukan pemberi hibah tersebut sakit lagi lalu meninggal. Maka adalah hibah itu sempurna, karena hibah itu telah sempurna dengan diserahkannya hibah tersebut kepada si penerima saat pemberi hibah dalam keadaan sehat.⁶⁵

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : PT. Alma'arif, 1987), cet.ke-1, h. 179.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mayoritas ulama bahwa seseorang dibolehkan untuk menghibahkan semua yang dimilikinya kepada orang lain . Muhammad Ibn Hasan dan sebagian ulama Hanafi berkata, “ tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dengan tujuan kebaikan”. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang bodoh yang wajib dibatasi tindakannya.⁶⁵ Sebagian ulama berpendapat bahwa suatu hibah menjadi hak penerima hanya dengan akad semata tanpa diharuskan syarat penerimaan langsung, sebab pokok masalah ini ialah perjanjian itu sah tanpa syarat sah tanpa harus diterima langsung, demikian pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Tsaur dan kalangan Zahiriyah. Berdasarkan pendapat tersebut jika seorang pemberi hibah atau penerima hibah meninggal sebelum penyerahan barang, maka hibah tersebut tidak batal. Sebab, akad semata suatu hibah telah menjadi milik orang yang menerima hibah tersebut.

Imam Abu Hanifah, Imam Syafi dan ats-Tsauri mengatakan, bahwa penerimaan secara langsung merupakan syarat shanya hibah belum ditetapkan. Jika pemberi hibah atau penerima hibah meninggal sebelum adanya serah terima, maka hibah tersebut dinilai batal.⁶⁷

4. Shighat (ucapan)

Yaitu *ijab* dan *qabul* berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk *ijab* yang jelas jika dia mengatakan : “Saya hibahkan

⁶⁵ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al- 'Umm* (Kitab Induk), terj. Ismail Yakub, (Malaysia : Victory Agency, 1989), cet.ke-1, h.9.

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, 181.

⁶⁷ Sayyid sabiq, *fiqih Sunnah (jilid 5)*, (Jakarta : pena pundi Aksara, 2006), h. 439.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadamu, saya berikan kepadau, saya jadikan milkmu tanpa bayaran,” dan termasuk *qabul* yang jelas seperti ucapan, :Saya terima, sya ridha,” *qabul* tidak sah kecuali jika langsung dan Abu Abbas berkata, boleh ada senjang waktu dan pendapat yang benar adalah pendapat pertama karena ia adalah pemberian hak milik, pada saat masih hidup, maka *qabul*-nya juga harus segera sama seperti akad jual beli.⁶⁸

Tidak sah hibah kecuali dengan ijab dan kabul yang diucapkan. Hibah itu sah melalui ijab dan kabul, bagaimanapun bentuk ijab kabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i berpendapat, dipegangnya kabul dalam hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul, yaitu (1) sesuai antara qabul dengan ijabnya, (2) qabul mengikat ijab, dan (3) aqad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (aqad tidak tergantung) seperti perkataan : aku hibahkan barang ini kepadamu, bila si anu datang dari Mekah. Perlu ada batas maksimal hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan batas wasiat yang tidak melebihi sepertiga harta peninggalan.⁶⁹ Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijab itu saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat bahwa itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya, karena tidak ada sunah yang mensyaratkan ijab kabul dan serupa itu.⁷⁰

⁶⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Loc. Cit*

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, h.76-77.

⁷⁰ Abd Shomad, *Op. Cit*, h. 360.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun ada beberapa hal dikecualikan dari syarat *qabul*, antara lain sebagai berikut :

- a) Jika seorang wanita menghibahkan gilirannya kepada madunya, maka tidak ada syarat *qabul* dari madunya untuk giliran itu menurut pendapat yang shahih.
- b) Jika raja memecat sebagian gubernur dan hakim dan yang lainnya, maka tidak harus ada *qabul* dari mereka dan inilah pendapat sebagian ulama terkini karena sudah menjadi adat kebiasaan.
- c) Jika ayah membelikan perhiasan untuk anaknya yang kecil lalu dihiasinya untuk si anak, maka barang itu tetap menjadi miliknya berbeda jika dia membelikan untuk isterinya, maka barang itu menjadi milik isterinya.

Selain harus memperhatikan rukun dan syarat di atas ketentuan-ketentuan pelaksanaan hibah harus diperhatikan dengan cara sebagai berikut⁷¹:

1. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
2. Beralihnya hak atas barang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
3. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.

⁷¹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), cet.ke-4, h.43.

4. Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunnah), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa di belakang hari.

D. Hikmah Hibah

Saling membantu dengan cara memberi sebagaimana hal dengan hibah, dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun hikmah hibah adalah sebagai berikut:

1. Memberi hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat di dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah yang dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘Anhu, Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda; *“Beri-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)”*.
2. Hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi dan menyayangi. Hibah atau hadiah dapat menghilangkan rasa dendam. Sebagaimana dalam hadits dari Anas radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, bersabda : *“Saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam”*.
3. Hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi. Abu Ya’la telah meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, bersabda : *“saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai”*.⁷²

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), ed.1, cet.ke-5, h. 218-219.

E. Pengertian Waris

Hukum waris Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.⁷³ Aturan tentang peralihan harta ini disebut berbagai nama seperti, *faraidh*, fikih mawaris, dan hukum *al-warits*. Kata yang lazim dipakai adalah kata *faraidh*, merupakan *jama'* (bentuk plural) dari lafazh *faridhah* yang mengandung arti *mafrudhah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu : suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas.⁷⁴ Kata *faraidh* jamak dari kata *faridhah*, erat sekali hubungannya dengan kata *fardh* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan.⁷⁵

Secara terminologi, hukum waris ialah :

الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحساب الموصل الى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من الشركة لكل ذي حق.

Artinya : *Hukum yang berhubungan dengan pembagian harta, pengetahuan tentang cara perhitungan terhadap harta, dan bagian-bagian yang wajib bagi masing-masing ahli waris.*

Istilah hukum waris menunjukkan aturan-aturan tentang peralihan harta orang yang sudah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Hal ini dapat dipahami bahwa peralihan sesuatu dari yang mewariskan kepada ahli waris berlaku sesudah yang bersangkutan meninggal dunia.⁷⁶

⁷³ Hajar M, *Op. Cit*, h. 15.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), ed.1, cet.ke-3, h.5.

⁷⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Depok : Rajawali Pers, 2017), ed.6, cet.ke-22, h. 313.

⁷⁶ Hajar M, *Op. Cit*, h.16-17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dasar hukum waris yakni Q.S. an-Nisa (4);11-12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَبِيهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. an-Nisa (4) : 11)⁷⁷

Ayat ini berisi tentang pokok-pokok dalam ilmu *faraidh* (pembagian harta warisan), pada ayat ini Allah telah menggambarkan pembagian warisan untuk anak-anak, baik anak laki-laki, anak perempuan, maupun cucu, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan dan bagi orang tua, baik bapak/ibu maupun kakek/nenek.

⁷⁷ Kementerian Agama, *mushaf Al-Qur'an dan Terjemah Hdits*, (Bandung : Cordoba, 2018), h. 78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
 الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِنْ
 لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”(Q.S. an-Nisa (4) : 12)⁷⁸

Ayat di atas Allah menggambarkan pembagian warisan untuk suami maupun isteri, dan pada ayat 12 ini juga Allah menggambarkan pembagian warisan untuk saudara-saudara (kasus *kalalah*). Menurut mayoritas ahli sunnah maksud *kalalah* adalah seseorang yang meninggal dunia tanpa

⁷⁸ Kementerian Agama, *mushaf Al-Qur'an dan Terjemah Hdits*, (Bandung : Cordoba, 2018), h. 79.

meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan tanpa meninggalkan ayah.⁷⁹

1. Rukun dan Syarat Waris

Warisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewariskan, orang yang mewarisi, dan yang diwarisi.

1. Orang yang mewariskan (*muwarrits*) yakni, orang mati atau orang yang meninggalkan harta atau hak..
2. Orang yang mewarisi (*warits*) yakni, orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan. dia berhak mendapatkan warisan dari orang lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukmi.
3. Yang diwarisi (*al-mauruts*) yakni, peninggalan. *Al-mirats* dinamakan juga *miraats* dan *irts*, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan.⁸⁰

Adapun syarat-syarat dalam warisan ada tiga yaitu, wafatnya *al-muwarrits* (pewaris), hidupnya orang yang mewarisi (ahli waris), dan mengetahui arah kekerabatan.

1. Wafatnya *al-muwarrits* (pewaris), yaitu baik wafatnya yang sebenarnya (*haqiqatan*), maupun dianggap atau dinyatakan telah meninggal (*hukman*).

⁷⁹ Hajar M, *Op. Cit*, h. 28.

⁸⁰ Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuh*, jilid 10, (Jakarta : Gema Insani, 2011), cet. ke-3, h.346.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Hidupnya orang yang mewarisi (ahli waris), yaitu adanya kepastian hidupnya ahli waris pada waktu pewaris wafat.

3 Mengetahui arah kekerabatan, yaitu mengetahui sisi kekerabatan dan jalur kewarisannya seperti ikatan suami-isteri, ikatan kekerabatan dan tingkat kekerabatan.⁸¹

G. Asas Hukum Waris

1. Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* yaitu peralihan harta dari orang yang telah mati kepada ahli waris berlaku secara otomatis menurut kehendak Allah tanpa adanya otoritas pewaris atau ahli waris. Jadi dapat disimpulkan bahwa asas *ijbari* ini ialah peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang berlaku dengan sendirinya tanpa ada usaha dari yang akan meninggal dunia atau kehendak yang akan menerima warisan.

Asas ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu peralihan harta, jumlah harta yang pindah, dan orang-orang yang akan menerima harta. *Pertama* aspek peralihan harta sebagaimana dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa orang laki-laki dan perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabat. *Kedua* aspek jumlah harta yang berpindah sudah jelas ditentukan. *Ketiga* aspek orang yang menerima peralihan harta, berarti bahwa orang-orang yang berhak atas harta warisan sudah ditetapkan secara pasti.

⁸¹ Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005) Cet.ke-1, h. 49-51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas *Bilateral*

Asas ini berarti bahwa seseorang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu kerabat garis keturunan laki-laki dan kerabat garis keturunan perempuan. Dalam ayat 7 surah An-Nisa, dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seseorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.

Asas *Individual*

Individual berarti bahwa harta warisan dapat dibagi untuk dimiliki secara perorangan. Keseluruhan harta dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi kepada setiap ahli waris yang berhak menurut jatah masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagiannya tanpa terikat kepada ahli waris lain.

Asas *Keadilan*

Keadilan artinya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Adapun jumlah bagian yang diterima terdapat dua bentuk. *Pertama* ada kalanya laki-laki mendapat jumlah hak yang sama dengan perempuan, seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam menurut ayat 11 surah an-Nisa. Pada ayat 12 surah an-Nisa juga disebutkan bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuan secara bersama mendapat sepertiga atau seperenam. *Kedua*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada kalanya laki-laki memperoleh bagian dua kali dari bagian yang diperoleh ahli waris perempuan pada kasus yang sama, seperti anak laki-laki menerima dua kali anak perempuan, atau satu orang anak laki-laki menerima dua kali anak perempuan, atau satu orang anak laki-laki sama haknya dengan dua anak perempuan. Saudara laki-laki menerima hak sama dengan yang diperoleh dua orang saudara perempuan. Demikian pula suami memperoleh hak kewarisan dua kali lipat dari yang diperoleh isteri.

Bila dilihat dari bagian yang diterima terdapat ketidak samaan, karena keadilan tidak hanya ditentukan dengan jumlah penerimaan hak, tetapi dikaitkan dengan kebutuhan. Secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak dari perempuan, karena laki-laki memikul kewajiban menafkahi, baik dirinya, isterinya, anak-anaknya maupun keluarganya, seperti ayah, ibu dan kerabat lainnya.⁸²

Asas Semata-mata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama selama yang mempunyai harta masih hidup.⁸³

⁸² Hajar M, *Op. Cit*, h. 39.

⁸³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h.28.

H. Sebab-sebab Kewarisan

1. Sebab mendapatkan kewarisan

Sebab-sebab kewarisan yang menjadikan seseorang berhak mewarisi harta warisan ada tiga yaitu :

a. Hubungan nasab (kerabat hakiki), yaitu ayah dan ibu, anak-anak, saudara, paman (saudara laki-laki ayah) dan seterusnya. Hanafiyyah menyebutkan *ar-Rahim*, yang dimaksud adalah kekerabatan hakiki, yaitu setiap hubungan yang penyebabnya adalah kelahiran. Warisan karena nasab mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Anak-anak dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan.
- 2) Ayah dan ayah-ayah mereka juga ibu. Artinya, ibu dan ibunya dan ibu dari ayah.
- 3) Saudara laki-laki dan saudara perempuan.
- 4) Paman-paman dan anak-anak mereka yang laki-laki saja.⁸⁴

b. Hubungan nikah. Yaitu, akad pernikahan yang sah antara suami-isteri walaupun mereka belum pernah melakukan hubungan intim suami-isteri atau berkhawat (tinggal berdua). Adapun pernikahan yang *fasid* atau tidak sah tidak menimbulkan hubungan kewarisan sama sekali.

c. Hubungan *wala'* yang merupakan kerabat hukmi (syar'i) yang juga disebut *wala' al-'itqi* atau *wala' an-ni'mah*, yaitu hubungan kekerabatan yang disebabkan karena memerdekakan hamba sahaya.

⁸⁴ Wahbah az-zuhaili, *Op. Cit*, h. 347.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam (syara') memberikan hak waris kepada tuan yang memerdekakan, bila budak itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, baik berdasarkan hubungan kekerabatan maupun hubungan pernikahan.⁸⁵

- d. Syafi'iyah dan Malikiyyah menambahkan sebab yang keempat yaitu representasi Islam (muslim) mendapatkan warisan seperti nasab. Peninggalan orang muslim atau sisa peninggalan diberikan kepada baitul mal sebagai warisan kepada orang-orang muslim dalam bentuk *ashabah*, bukan karena kemaslahatan, hal ini jika tidak ada yang mewasrisi tiga hal di atas, atau ada penyebab mewarisi tapi tidak menghabiskan semua peninggalan.⁸⁶

2. Sebab tidak mendapatkan kewarisan

Para ulama mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan.⁸⁷

Dalam referensi lain disebutkan yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah :

- a. Karena halangan kewarisan

Dalam hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-hal berikut;

⁸⁵ Muhammad Ali Al-Sabouni, *Op. Cit*, h. 48.

⁸⁶ Wahbah az-zuhaili, *Op. Cit*, h.348.

⁸⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), cet.ke-1, h.112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pembunuhan
2. Perbedaan agama
- b. Karena adanya kelompok yang diutamakan dan hijab.

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak dibandingkan dengan saudara, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada si anak dibandingkan dengan kakek.

Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama dari saudara seayah atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis penghubung (yaitu dari ayah dan ibu) sedangkan saudara seayah dan seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung (yaitu ayah atau ibu saja).

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan dari si mayit, yaitu :

1. Zakat atas harta peninggalan

Adapun yang dimaksud dengan zakat atas harta peninggalan, yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh si mayit, akan tetapi zakat tersebut belum dapat direalisasikan, lantas ia meninggal, maka untuk ini zakat tersebut harus dibayar dari harta peninggalannya tersebut, seperti zakat pertanian dan zakat harta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Biaya pemeliharaan mayat

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan mayat yaitu, biaya untuk penyelenggaraan jenazah yaitu seperti kafan dan penguburan.

3. Hutang si mayit

Sebagaimana yang yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya berbunyi sebagai berikut: Jiwa orang mukmin disangkutkan dengan utangnya, sehingga utangnya. Sehingga utangnya itu di lunasi.

4. Wasiat

Wasiat yang dimaksud adalah bukan untuk kepentingan ahli waris. Dan wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta peninggalan.⁸⁸

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang pada saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.⁸⁹

⁸⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op. Cit*, h.52

⁸⁹ Anir Syarifuddin, *Op. Cit*, h.206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta warisan menurut beberapa madzhab

a. Menurut kalangan Hanafiyah

Pendapat yang termasyhur dari kalangan hanafiyah (ahli-ahli hukum madzhab hanafi) mengemukakan bahwa harta benda yang ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan dengan orang lain (dengan pihak ketiga).

b. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah

Menurut pendapat ulama-ulama ini yang dimaksud dengan harta peninggalan itu adalah segala yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda, maupun hak-hak. Baik hak-hak tersebut hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan.

Harta warisan itu terdiri dari beberapa macam. Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak.

Dalam menentukan bentuk hak yang mungkin dijadikan harta warisan menurut perbedaan pendapat para ulama tersebut Dr. Yusuf Musa mencoba membagi hak tersebut kepada beberapa bentuk sebagai berikut:

- 1) Hak kebendaan; yang dari segi haknya tidak dalam rupa benda/harta tetapi karena hubungannya yang kuat dengan harta dinilai sebagai harta ; seperti hak lewat di jalan umum atau hak pengairan;
- 2) Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut pribadi si meninggal seperti mencabut pemberian kepada seseorang;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut dengan kehendak si mayit , seperti hak khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan sebuah transaksi);
- 4) Hak-hak bukan berbentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang seperti hak ibu untuk menyusukan anak.

Tentang hak-hak mana diantara hak-hak tersebut diatas yang dapat diwariskan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Hak-hak yang oleh ulama disepakati dapat diwariskan yaitu hak-hak kebendaan yang dapat dinilai dengan harta seperti hak melewatijalan.
- 2) Hak-hak yang disepakati oleh ulama tidak dapat diwariskan yaitu hak-hak yang bersifat pribadi, seperti hak pemeliharaan dan hak kewalian ayah atas anaknya.
- 3) Hak-hak yang diperselisihkan oleh ulama tentang kelegalan pewarisnya adalah hak-hak yang tidak bersifat pribadi, dan tidak pula bersifat kebendaan , seperti hak khiyar dan hak pencabutan pemberian.⁹⁰

I. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris ada dua macam yaitu, ahli waris hubungan darah dan ahli waris hubungan perkawinan. Adapun ahli waris hubungan darah adalah :

⁹⁰ Ibid, h.209-210.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Anak laki-laki dan anak perempuan.
2. Cucu laki-laki dan cucu perempuan
3. Ayah
4. Ibu
5. Kakek
6. Nenek
7. Saudara laki-laki ataupun perempuan, sekandung, seayah, maupun seibu
8. Anak dari saudara
9. Paman
10. Anak paman.

Selain ahli waris hubungan sedarah di atas, terdapat pula ahli waris dalam hubungan perkawinan. Ahli waris yang disebabkan hubungan perkawinan adalah suami dan isteri. Suami menjadi ahli waris dari isterinya yang meninggal dunia, begtu pula isteri menjadi ahli waris dari suaminya yang meninggal lebih dahulu.

Adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak menyebabkan hak kewarisan terhadap kerabat suami atau kerabat isteri. Dalam hal ini anak tiri dari suami atau anak tiri dari isteri bukan ahli waris bagi suami atau isteri, tetapi hanya ahli waris bagi ayah atau ibunya.⁹¹

Adapun ahli waris yang mendapatkan bagian pasti disebut dengan *dzawu al-furudh*. Berikut rincian ahli waris yang termasuk *dzawu al-furudh*:

⁹¹ Hajar M, *Op. Cit*, h.62-72.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Anak perempuan, mendapatkan $\frac{1}{2}$ bila seorang dan tidak ada anak laki-laki, $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki.
2. Cucu perempuan, mendapatkan $\frac{1}{2}$ bila seorang dan tidak ada cucu laki-laki, $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki.
3. Ibu, mendapatkan $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak atau cucu pewaris, atau bersamanya ada dua orang saudara atau lebih. $\frac{1}{3}$ bila tidak punya anak atau cucu dan tidak ada saudara bersamanya. $\frac{1}{3}$ sisabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau isteri.
4. Nenek, mendapatkan $\frac{1}{6}$
5. Saudara perempuan kandung, mendapatkan $\frac{1}{2}$ bila seorang saja dan tidak ada saudara laki-laki kandung, $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih dan tidak ada saudara laki-laki kandung.
6. Saudara perempuan seayah, mendapatkan $\frac{1}{2}$ bila seorang saja, dan tidak diikuti oleh saudara laki-laki seayah, $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih, $\frac{1}{6}$ bila bersamanya seorang saudara perempuan kandung.
7. Saudara seibu, mendapatkan $\frac{1}{6}$ baik laki-laki maupun perempuan bila seorang, $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih.
8. Suami dan isteri, suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ bila isteri tidak meninggalkan anak, $\frac{1}{4}$ bila meninggalkan anak. Isteri mendapatkan $\frac{1}{4}$ bila suami tidak meninggalkan anak, $\frac{1}{8}$ bila suami meninggalkan anak atau cucu.
9. Ayah dan kakek, ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ sebagai *dzawu al-furudh* berdasarkan QS. An-Nisa ayat 11, sedangkan kakek juga menerima $\frac{1}{6}$ bila ayah tidak ada.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu ada juga ahli waris yang tidak ditentukan sahamnya secara pasti lazim disebut *'ashabah*. *'Ashabah* ini menurut bahasa Arab dikhususkan kepada kerabat laki-laki. Ahli waris *ashabah* terbagi menjadi tiga kelompok, *'ashabah binafsihi*, *'ashabah bil ghayrihi*, dan *'ashabah ma'alghayrihi*.

'Ashabah bi nafsihi adalah *'ashabah* dengan sendirinya tanpa bantu ahli waris lain. Ia bersatatus sebagai ahli waris yang berhak atas seluruh atau sisa harta yang terdiri dari laki-laki saja,

'Ashabah bi ghayrihi adalah ahli waris perempuan yang pada dasarnya bukan *'ashabah*, tetapi karena didampingi saudaranya yang laki-laki, maka mereka secara bersama sebagai *'ashabah* mereka dapat mewarisi seluruh harta bila tidak ada ahli waris *dzawu al furudh* dan sisa harta bila ada ahli waris *dzawu al furudh*.

Adapun *'Ashabah ma'a ghayrihi* adalah saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah yang berstatus *'ashabah* bila mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, dan ketika itu tidak terdapat anak laki-laki atau cucu laki-laki dan ahli waris *'Ashabah bi nafsihi*.⁹²

J. Hibah Hubungannya dengan Kewarisan

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211 KHI). Yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada, agar tidak terjadi perpecahan di dalam keluarga.

⁹² *Ibid*, h. 81.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memang, di dalam prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw. Hendaknya bagian mereka disamakan walaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi pola pembagian demikian, oleh demikian sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Di satu sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh dengan cara hibah, justru sebelum si pewaris meninggal dunia. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam, menegaskan demikian, didasari oleh kebiasaan yang dianggap “positif” oleh masyarakat. Karena, bukanlah sesuatu yang aneh, apabila pembagian waris, dilakukan akan menimbulkan penderitaan pihak tertentu, lebih-lebih apabila penyelesaian dalam bentuk gugatan di pengadilan. Kadang-kadang hibah diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah meninggal. Perjanjian semacam ini disebut dengan pengunduran diri (*takharruj*).

Takharruj adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang atau beberapa orang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan cara memberikan suatu prestasi⁹³ baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagi.

⁹³ Hajar M, *Op. Cit*, 86.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam prakteknya penyesuaian secara *takharruj* dapat dikategorikan kepada tiga bentuk yaitu :

- a. Kesepakatan dua orang di antara ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari menerima harta dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh ahli waris lain dari hartanya sendiri.
- b. Kesepakatan ahli waris atas keluarnya salah seorang dari menerima harta warisan dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang akan mereka terima dari harta warisan.
- c. Kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang menerima hak kewarisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri.

Penyesuaian secara *takharruj* ini adalah sebagai tindakan kebijakan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu bila kemaslahatan dan keadilan membutuhkannya. Hal ini dapat ditempuh dengan maksud meniadakan kesempitan dalam bermuamalah tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Dengan cara ini kesulitan untuk memecahkan persoalan pembagian kewarisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.⁹⁴

Persoalan perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu :

1. Pertama, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan

⁹⁴ Ibid, h. 88-89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut sistem kewarisan. Karena seperti kata Umar ibn al-Khattab, perdamaian justru lebih baik, dari pada nantinya harus melibatkan pengadilan.

2. Kedua, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Pembagiannya harus rata.

Selain hal tersebut yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan hibah adalah persaksian dua orang saksi, dan dibuktikan dengan buku otentik. Ini dimaksudkan agar kelak dikemudian hari ketika si pemberi hibah meninggal dunia, tidak ada anggota keluarga atau ahli warisnya mempersoalkannya dengan itikad yang kurang atau tidak terpuji.⁹⁵

⁹⁵ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h.473.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis buat maka skripsi yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau, ini dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau, dilakukan dengan cara membagikan sebelum orang tua meninggal dunia, keluarga yang melaksanakan pembagian harta tersebut ada yang membagi sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan dan ada yang membagikan harta seperti pembagian bagian dalam *faraidh* namun tetap dalam pembagian harta tersebut dilakukan atas kesepakatan dalam keluarga, agar kelak tidak terjadi perselisihan antara anak atau ahli waris lainnya ketika orang tua tersebut telah meninggal dunia.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau. Pembagian harta yang dilaksanakan Desa Kuala Keritang Kec. Keritang dengan cara hibah yaitu orang tua membagikan harta kepada anak sebelum meninggal dunia, dilakukan dengan cara bagi sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan, hal ini dilakukan untuk menghindari pertikaian dan pertengkaran antara ahli waris. Dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini sebagaimana pada pasal 211 KHI yaitu hibah orang tua dapat diperhitungkan sebagai harta warisan. Oleh karena itu penggunaah hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau boleh dilakukan, dan keluarga yang melaksanakan pembagian harta sebagaimana penulis sebutkan di atas disebut melakukan *hilah* yang.dibolehkan. Dan jika pembagian harta tersebut dibagikan untuk menghindari pembagian secara *faraidh* maka tidak boleh. Adil yang dimaksud sebagaimana dalam kasus pada penelitian ini adalah hanya menurut masyarakat Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau, karena makna adil dalam adil hukum waris adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan :

1. Pembagian harta yang dilakukan baik secara hibah ataupun waris, keduanya boleh dilakukan, akan tetapi dalam pelaksanaan pembagiannya harus memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum waris atau hibah.
2. Pembagian harta waris itu harus sesuai dengan ilmu *faraidh*, adapun jika tidak dibagikan secara waris maka, masyarakat harus berhati-hati dalam membagikan harta warisan, karena hukum yang ditimbulkan akan berbeda. Jika pembagian harta ingin dilakukan dengan cara hibah maka, harus memperhatikan ketentuan pembagian harta dengan cara hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, jilid 11, cet.ke1, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: AMZAH, cet.ke-1, 2010.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet.ke-2, 2008.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta : AMZAH, (2008), cet.ke-3, 2008.
- Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet.ke-1, 2010.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press., Cet ke-1, 1976.
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram (6)*, Jakarta : Darul Haq, 2012.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGarafindo Persada, cet.ke-3, 1998.
- Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Rajawali Persda, ed.1, cet.ke-1, , 2015.
- Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-'Umm* (Kitab Induk), terj. Ismail Yakub, Malaysia : Victory Agencie, 1989.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, ed.1, cet.ke-6, 2011.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia, cet.ke-1, 2009.
- Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, Pekanbaru : Suska Press, cet.ke-1, 2014.
- Haswari, *Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah Tentang Hilah Syar'iyah*, Disertasi, (Pekanbaru : Program Pascasarjana IAIN Susqa, 2000.
- Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, ed.1, cet.ke-5, 2010.
- Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bndung: Mandar Maju, 2003.
- Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum IslamI*, trj Asep Saefullah FM, Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, Jakarta : Pustaka Azzam, 2000.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama R.I, 2001).

Maman Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta : Darus Sunnah, cet.ke-2, 2013.

Prawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, cet.ke-4, 1999.

Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Kompleck Percetakan Al-Qur'an Al-Karim, 1971.

Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, cet.ke-1, 2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2013, cet.ke-2, 2013.

Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : PT. Karya Toha Putra Semarang, edisi yang disempurnakan, 2014.

Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, ed.1, cet.ke-1, 2013.

Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*, Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, cet.ke-1, 2005.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (3)*, Jakarta : Darus Sunnah Press, cet.ke-2, 2017.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Depok : Rajawali Pers, ed.6, cet.ke-22, 2017.

Mucht A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta : Badan Litbang Kementerian Agama RI, cet.ke-1, 2012.

Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-kaidah Ijtihad dab Fatwa dalam Ekonomi Islam*, Depok : Rajawali Pers, cet.ke-1, 2017.

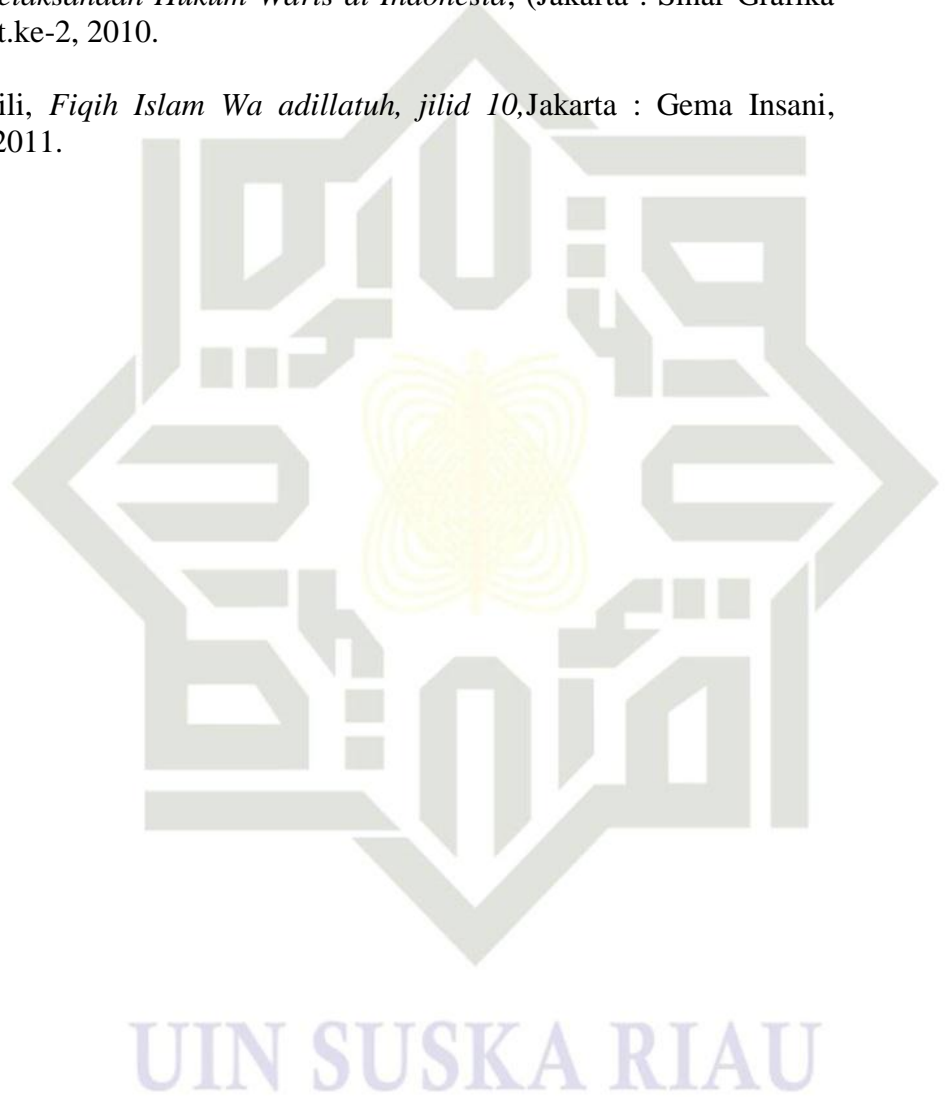
Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, cet.ke-4, 2001.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemah oleh Kamaluddin A. Marzuki, jilid, 12, Bandung : PT Alma'arif, Cet.ke-1, 1987.

Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah (jilid 5)*, Jakarta : pena pundi Aksara, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Jakarta : Sinar Grafika, cet.ke-4, 2013.
- Ulamman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, cet.ke-45, 2010.
- Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, terj.Ahmad Sudjono, Bandung : PT. Al-Ma'arif, tt, cet.ke-1.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, cet.ke-2, 2010.
- Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuh, jilid 10*, Jakarta : Gema Insani, cet.ke-1, 2011.



PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN HIBAH SEBAGAI CARA MENSIASATI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA KUALA KERITANG KEC. KERITANG KAB. INDRAGIRI HILIR RIAU

Pertanyaan kepada keluarga yang melaksanakan pembagian harta sebelum orang tua meninggal dunia.

Bagaimana pelaksanaan pembagian harta :

1. Bagaimana sistem pembagian harta di keluarga ibu/bpk ?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui sistem pembagian harta secara waris ?
3. Apakah anak sudah memiliki harta tersebut secara utuh atau tidak ?
4. Apakah harta tersebut dibagikan secara adil ?
5. Apakah orang tua masih ada hak atas harta yang telah dibagikan ketika masih hidup ?
6. Apakah ada sengketa yang sampai ke Pengadilan ?
7. Apa alasan harta dibagikan ketika orang tua masih hidup ?

Pertanyaan kepada tokoh masyarakat desa Kuala Keritang.

Bagaimana pelaksanaan pembagian harta :

1. Bagaimana sistem pembagian harta yang ada di masyarakat desa Kuala Keritang ?
2. Apakah anak yang mendapatkan harta dari orang tuanya tersebut sudah memiliki secara utuh atau belum?
3. Apakah harta tersebut dibagikan secara adil antara anak laki-laki maupun anak perempuannya?
4. Apakah ada sengketa yang sampai ke Pengadilan ?
5. Apa alasan masyarakat di desa ini membagikan harta kepada anaknya ketika orang tua masih hidup ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI


Skripsi dengan judul *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN HIBAH SEBAGAI CARA MENSIASATI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA KUALA KERITANG KEC. KERITANG KAB. INDRAGIRI HILIR RIAU*, yang ditulis oleh :

Nama : **NURKAMALIA**
NIM : 11521201170
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2019
Waktu : 13.30 Wib
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

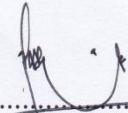
Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

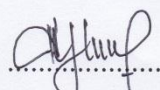
Ketua
Drs. Zainal Arifin, MA



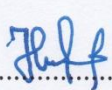
Sekretaris
Ilham Akbar, S.H.I, SH, MH




Penguji I
Yuni Harlina, M.Sy



Penguji II
Dr. Hj. Hertina, M.Pd



Mengetahui :
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum



Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN KERITANG
DESA KUALA KERITANG

Alamat : Jalan Penunjang Kotabaru – Selensen Kode Pos 29274

SURAT KETERANGAN

Nomor : 07 / SK / KWK / II / 2019.

Kepala Desa Kuala keritang kecamatan keritang Kabupaten Indragiri Hilir,
 Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURKAMALIA
 NIM : 11521201170
 Program Studi/Jenjang : Hukum Keluarga/S1
 Alamat : Jl.Pelajar Gg. Tiga Serangkai Tembilahan Hulu.

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian dengan baik
 didesa kuala keritang dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
 PENGGUNAAN HIBAH SEBAGAI CARA MENSIASATI PEMBANGIAN HARTA
 WARISAN.

Demikianlah Surat Keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KUALA KERITANG
 PADA TANGGAL : 04 - 2 - 2019

KEPALA DESA KUALA KERITANG

M. IDRIS, SE




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN SELESAI MENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurkamalia
 NIM : 11521201170
 Tempat / TanggalLahir : Kuala Keritang/29 JUNI 1997
 Program Studi / Jurusan : Hukum Keluarga (AH)
 Semester : VIII (8)
 No HP : 085363166774
 Alamat : Jl. Pelajar Gg. Tiga Serangkai Tembilahan Hulu

Dengan ini menyatakan bahwa, saya benar telah selesai meneliti / melaksanakan
 riset pada : Senin, 04 Februari 2019

Nama Tempat Penelitian : Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir
 Alamat : Jalan Penunjang Kotabaru-Selensen
 Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Hibah
 sebagai Cara mensiasati Pembagian Harta warisan di
 Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir
 Riau.

Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila
 dikemudian hari saya terbukti melakukan pembohongan / penipuan terhadap
 pernyataan saya ini, makas aya siap menerima segala resiko.

Pekanbaru, 03 September 2019

Yang menyatakan

Nurkamalia



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN KERITANG
DESA KUALA KERITANG

SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH

Nomor Registrasi Camat :
Tanggal :

Nomor Registrasi Desa : 05/50000/2018/11/2018
Tanggal : 13 - 12 - 2018

Nama Pemilik

KHALID MOHAMMAD NOR

DESA KUALA KERITANG
KECAMATAN KERITANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PROPINSI RIAU 20274



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN KERITANG
DESA KUALA KERITANG

Alamat : Jalan Penunjang Kotabaru – Selensen Kode Pos 29274

SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH
NOMOR : 05 / SKRPPT / KWK / XII / 2017

DESA : KUALA KERITANG
KECAMATAN : KERITANG
KABUPATEN : INDRAGIRI HILIR

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : KHALID MOHAMMAD NOR.
Tempat Tanggal Lahir : Makkah, 07 – 01 – 1984.
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Tani.
Alamat : Pulau Kijang Kecamatan Reteh.

Benar pada waktu ditanda tangani ianya memiliki/menguasai sebidang tanah yang terletak di Parit Mutiara II Dusun Berkat Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri hilir, dengan ukuran lebar 140 M Panjang 180 M dengan luas \pm 25200 M². Dipergunakan untuk *Tanah Perkebunan*. Adapun batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah	: Sungai Keritang	: 180 Meter
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah	: Tanah MAHFUD	: 180 Meter
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah	: Rol Tanah Prt Mutiara I	: 140 Meter
- Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah	: Prt Kongs Prt Mutiara II	: 140 Meter

Tanah tersebut berasal dari :

Nama :
Alamat :

Bukti Pemilikan / Penguasaan Tanah berdasarkan :

- Hasil Usaha Gerapan Tahun
- Surat Keterangan Gantu Kerugian
- Pembagian Warisan
- Surat Keterangan Sempadan Tanggal
- Bukti pembayaran PBB dari tahun

Sampai saat ini tanah tersebut tidak ada bersengketa dengan siapapun juga, demikian pula tanah tersebut tidak berada dalam tanggungan/jaminan atau sitaan dari pihak lain.

Tanah tersebut saat ini dipergunakan untuk : **PERKEBUNAN**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nomor Reg Camat : 705/35/KWT/2018
Tanggal : 14-2-2018

Nomor Reg Desa : 05/SKRPT/KWK/11/2
Tanggal : 13-02-2018

CAMAT KERITANG
KECAMATAN KERITANG
HADY RAHMAN, S.Sos M.Si
NIP. 197306161995031001

KEPALA DESA KUALA KERITANG
KHALID MOHAMMAD NOR.
NIP. 198401072000030001



Han Vnpa Ummuung Ummuung Ummuung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : **KHALID MOHAMMAD NOR.**
 Tempat Tanggal Lahir : Makkah, 07 – 01 – 1984.
 Warganegara : Indonesia
 Pekerjaan : Tani.
 Alamat : Pulau Kijang Kecamatan Reteh.

Dengan berbadan sehat dan pikiran yang waras serta tidak dipengaruhi oleh siapapun juga, bahwa saya telah menyatakan dengan sebenarnya dan benar benar saya memiliki sebidang tanah yang terletak di Parit Mutiara II Dusun Berkat Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri hilir, dengan ukuran lebar 140 M Panjang 180 M dengan luas \pm 25200 M². Dipergunakan untuk *Tanah Perkebunan*. Adapun batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah	: Sungai Keritang	: 180 Meter
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah	: Tanah MAHFUD	: 180 Meter
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah	: Rol Tanah Prt Mutiara I	: 140 Meter
- Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah	: Prt Kongsu Prt Mutiara II	: 140 Meter

Adalah milik saya sendiri yang saya perdat dari Hasil Pembagian Warisan Tertinggal diwaktu pengeluaran surat ini dan hingga saat ini tidak ada persengketaan, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atas tanah tersebut.

Dan apabila terjadi tuntutan dari pihak manapun juga, maka saya siap bertanggung jawab dan tidak melibatkan pemerintah dan saksi saksi yang bertanda tangan dalam Surat keterangan ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kuala Keritang, 27 – 12 – 2017.



Yang Membuat Pernyataan,

3000
TIGA RIBU RUPIAH

KHALID MOHAMMAD NOR.

Saksi – Saksi Sempadan :

1. **MAHFUD**

2.

3.

4.

KEPALA DUSUN BERKAT

KEPALA PARIT MUTIARA II

H. CAKUR

DG. MADEWEK

Mengetahui :

KEPALA DESA KUALA KERITANG

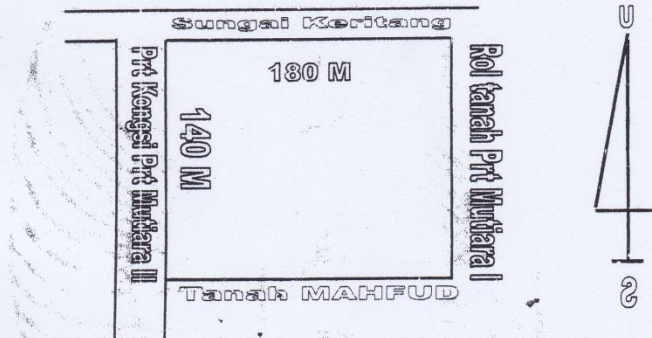




SCEERT KAART (PETA SITUASI TANAH)

Sebidang Tanah yang akan ditegaskan oleh status haknya oleh Badan Pertanahan Nasional yang terletak di :

Jalan / Parit / RT	: Prt Mutiara II
Dusun	: Berkat
Desa	: Kuala Keritang
Kecamatan	: Keritang
Kabupaten	: Indragiri Hilir
Propinsi	: Riau
Luas Tanah	: 25200 M ² .
Dikuasai oleh	: KHALID MOHAMMAD NOR.



Kuala Keritang, 27 - 12 - 2017.

Yang menguasai Tanah

[Signature]

KHALID MOHAMMAD NOR.

Saksi - Saksi Sempadan :

1. *[Signature]*
MAHFUD

2.

3.

4.

KEPALA DUSUN BERKAT

KEPALA PARTI MUTIARA II

[Signature]
H. CAKUR

[Signature]
DG. MADFEK

Mengetahui :

KEPALA DESA KUALA KERITANG



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ASMAH
Tempat Tgl Lahir/Umur : Pulau Kijang, 30-12-1950
Pekerjaan : IRT
Alamat : RT 002 RW 001 Desa Kuala Keritang
(Dalam Hal ini disebut PIHAK PERTAMA)
2. Nama : AMINAH
Tempat Tgl Lahir/Umur : Pl. Kijang, 01-07-1957
Pekerjaan : IRT
Alamat : Prt Mutiara Desa Kuala Keritang
(Dalam Hal ini disebut PIHAK KEDUA)
3. Nama : ABDUL HAFIDZ MATUTU YAMAR
Tempat Tgl Lahir/Umur : Pulau Kijang, 27-08-1957
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sriwijaya Kec Tungkal Ilir
(Dalam Hal ini disebut PIHAK KETIGA)
4. Nama : NAJAMIAH
Tempat Tgl Lahir/Umur : Pulau Kijang, 31-12-1960
Pekerjaan : IRT
Alamat : Prt Mutiara Desa Kuala Keritang
(Dalam Hal ini disebut PIHAK KEEMPAT)
5. Nama : MUSDALIFAH MATUTU
Tempat Tgl Lahir/Umur : Cianjur, 31-12-1962
Pekerjaan : IRT
Alamat : Makkah
(Dalam Hal ini disebut PIHAK KELIMA)
6. Nama : KHARYAH MATUTU
Tempat Tgl Lahir/Umur : Cianjur, 05-01-1963
Pekerjaan : IRT
Alamat : Makkah
(Dalam Hal ini disebut PIHAK KEENAM)
7. Nama : SABARUDDIN MATUTU
Tempat Tgl Lahir/Umur : Keritang, 12-04-1980
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Batam
(Dalam Hal ini disebut PIHAK KETUJUH)
8. Nama : KHALID MOHAMMAD NOR
Tempat Tgl Lahir/Umur : Makkah, 07-01-1985
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pulau Kijang Kecamatan Reteh
(Dalam Hal ini disebut PIHAK KEDELAPAN)

Dengan akal dan pemikiran yang waras serta tanpa ada paksaan dari siapapun juga kami **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM** dan **PIHAK KETUJUH**, menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami Ahli Waris yang Sah atas kepemilikan kebun orang tua menyerahkan sepenuhnya kebun tersebut kepada **PIHAK KEDELAPAN** dan sah menjadi hak milik **PIHAK KEDELAPAN**, Sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 05/SKRPPT/KWK/XII/2017, dengan ukuran lebar 140 M Panjang 180 M dengan luas $\pm 25200 \text{ M}^2$. Dipergunakan untuk **Tanah Perkebunan**. Adapun batas – batas sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah	: Sungai Keritang	: 180 Meter
Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah	: Tanah MAHFUD	: 180 Meter
Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah	: Rol Tanah Prt Mutiara I	: 140 Meter
Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah	: Prt Kongsu Prt Mutiara II	: 140 Meter

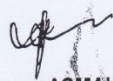
Demikian Surat Pernyataan ini kami dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan apabila terjadi tuntutan dari pihak manapun juga, maka kami siap bertanggung jawab dan tidak melibatkan pemerintah dan saksi - saksi yang bertanda tangan dalam Surat pernyataan ini.

Kuala Keritang, 27 Desember 2017.

KAMI YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

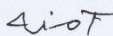
Yang Menyerahkan :

PIHAK PERTAMA



ASMAH

PIHAK KEDUA



AMINAH

PIHAK KETIGA



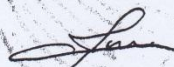
ABDUL HAFIDZ MATUTU

PIHAK KEEMPAT



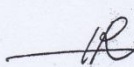
NAJAMIAH

PIHAK KELIMA



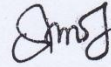
MUSDALIFAH MATUTU

PIHAK KEENAM



KHARYAH MATUTU

PIHAK KETUJUH



SABARUDDIN MATUTU

Yang Menerima

PIHAK KEDELAPAN



KHALID MOHAMMAD NOR

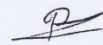
Saksi - Saksi :

KEPALA DUSUN BERKAT



H. CAKUR

KEPALA PARIT MUTIARA II



DG. MADEVEK

Mengetahui :

KEPALA DESA KUALA KERITANG





PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/16941
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/65/2019 Tanggal 2 Januari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **NURKAMALIA**
2. NIM / KTP : **11521201170**
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN HIBAH SEBAGAI CARA MENSIASATI PEMBAGIAN HARTA WARISAN (DI DESA KUALA KERITANG KEC. KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU)**
7. Lokasi Penelitian : **DESA KUALA KERITANG KEC. KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU**

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 Januari 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Svariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Akasia No.01 Telephone ☎ (0768) 22904 Faximile (0768) 21383
Tembilahan Kode Pos 29211

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2019/24

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/16941 Tanggal 3 Januari 2019, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **NURKAMALIA**
NIM : 11521201170
Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga /S1
Alamat : Jl. Pelajar Gg. Tiga Serangkai Tembilahan Hulu
Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN HIBAH SEBAGAI CARA MENSIASATI PEMBAGIAN HARTA WARISAN (DI DESA KUALA KERITANG KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**
Lokasi Penelitian : **DESA KUALA KERITANG KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 21 Januari s/d 21 April 2019.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 21 Januari 2019

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Kabid. Politik dan Kemasyarakatan,



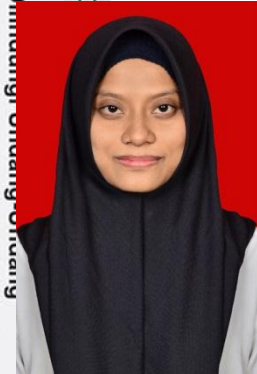
HARYONO KARIM

Pembina

NIP. 19750421 199403 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.



BIOGRAFI PENULIS

Nurkamalia dilahirkan di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang tepatnya di desa Kuala Keritang pada tanggal 29 juni 1997. Anak ke tujuh dari tujuh bersaudara pasangan dari bpk Nandu dan ibu Nursiah. Penulis memilik 6 saudara, saudara pertama M. Ansar bekerja sebagai pedagang, kedua Suaidah Nour sebagai ibu rumah tangga dan guru mengaji di rumah, ke tiga Ratna Dewi sebagai ibu rumah tangg, ke empat Amir Daus pengusaha, ke lima Heriyanti S.Pd.I guru , dan ke enam Nurwilda, SE pegawai di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis menyelesaikan pendidikan di Mandrasah Ibtidaiyah Sabilal Muhtadin Tembilahan Hulu pada tahun 2009.

Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 094 Tembilahan, dan selesai pada tahun 2012, kemudian setelah tamat dari sekolah menengah pertama, penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 039 Tembilahan dan tamat pada tahun 2015. Setelah selesai dari pendidikan tingkat menengah atas, penulis punya keinginan yang tinggi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan mengambil jurusan yang diinginkan. Berkat usaha dan do'a dari kedua orang tua, penulis mendapat kesempatan untuk lanjut ke perguruan tinggi negeri dengan beasiswa, pada tahun 2015 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga. Penulis menyelesaikan sarjana satu (S1) pada tahun 2019.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.